

*Revisi*



# RENCANA STRATEGIS

## DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN

### KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 - 2023



**DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN**  
Jl. Sentot Alibasa, Jati Hilir Pariaman Tengah Kota Pariaman  
Sumatera Barat Telp/Fax : (0751) 92060

## KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.

Syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan shalawat serta salam untuk junjungan kita Raslullah Shalallahu 'Alaihi wa Salam, karena telah selesainya disusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan ini. Revisi Renstra ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan awal RPJMD.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman sesuai visi dan misi kepala daerah (KDH) terpilih, memiliki tujuan "*Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian*" Kota Pariaman, walaupun disadari sebagai daerah kota yang terus berkembang, maka penyusutan lahan pertanian tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah edisi revisi karena dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Hasil Validasi dan Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Yang menyebabkan terjadinya penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur program kegiatan serta revisinya beberapa target dari Indikator Kerja Utama yang didasarkan pada hasil evaluasi pencapaian Renstra pada pertengahan tahun 2021.

Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan dan instansi sektor terkait dalam mensukseskan pembangunan sektor pertanian, pangan dan perikanan. Tugas

membangun sektor pertanian, pangan dan perikanan kedepan adalah tugas bersama, bukan tugas pemerintah semata.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor pertanian, pangan dan perikanan khususnya di Kota Pariaman.

Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman



DASRIL, S.Sos.  
NIP. 19691219 199303 1 002

## DAFTAR ISI

		<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	.....	iii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1	Latar Belakang .....	I-1
1.2	Landasan Hukum .....	I-3
1.3	Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4	Sistematika Penulisan .....	I-8
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> ..	II-1
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ....	II-1
2.2	Sumberdaya Perangkat Daerah .....	II-48
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-50
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-59
<b>BAB III</b>	<b>ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	III-1
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	III-1
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-3
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	III-6
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-14
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis .....	III-19
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	IV-1
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	V-1
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .	VI-1
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	VII-1
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	VIII-1
<b>LAMPIRAN</b>	.....	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. IKU
2. Struktur Dinas
3. Pohon Kinerja
4. Cascading
5. Matrik Program Kegiatan BBI
6. Matrik Program Kegiatan BPP
7. Matrik Program Kegiatan Dinas
8. Matrik Program Kegiatan Dinas Perubahan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPPP) Kota Pariaman tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi walikota terpilih dengan sasaran/tujuan pembangunan urusan pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan dan perikanan selama tahun 2018-2023 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018-2023, memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi kegiatan pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Bersifat indikatif, dan dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun 2018-2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

- b. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
- d. Penetapan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2018-2023 diselaraskan dengan dokumen RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pariaman yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan pertanian, perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kota Pariaman, Renstra Dinas/Badan tingkat Provinsi Sumatera Barat serta Renstra Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, maka Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 225/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328);
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 165);
20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 9).
21. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Pemerintahan Kota Pariaman.
22. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 47).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan sebagai salah satu dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan urusan pertanian, pangan dan perikanan untuk memberikan pedoman arah Kebijakan Pembangunan

Pertanian, Pangan dan Perikanan dan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, stakeholders terkait dalam menentukan prioritas program dalam pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023. Pencapaian tersebut ditempuh melalui rangkaian upaya terpadu dan terarah sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang ditetapkan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya di dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian, pangan dan perikanan lima tahunan baik pelaksanaan pembangunan urusan pertanian, pangan dan perikanan antar wilayah, antar sektor serta lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis tahun 2018-2023 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun;
2. Teridentifikasinya program dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas selama 5 (lima) tahun;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan;
4. Merupakan bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Pariaman dalam kurun waktu 2018-2023 yang berkaitan dengan rencana pembangunan Pertanian, Pangan serta Perikanan dan Kelautan;

5. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kota Pariaman;
6. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman baik tahunan maupun lima tahunan;
7. Memudahkan jajaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, serta stakeholders terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan perikanan secara terpadu dan terarah.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3. Sumberdaya Aset/Modal
- 2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

##### **2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

Sejak terbentuknya Kota Pariaman Tahun 2002, telah terjadi beberapa kali perubahan Nomenklatur dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengurus urusan pertanian, pangan dan perikanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Terakhir, ketiga urusan digabung dalam satu dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 9), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 47). Maka Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

##### **A. Tugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman**

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang pangan, serta urusan pemerintah bidang perikanan.

## **B. Fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman**

Dinas dalam melaksanakan tugas diatas maka Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan bidang perikanan;
- c. pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- d. pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pertanian, pangan dan perikanan yang diberikan oleh Walikota.

### **2.1.1.2. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, yang membawahi :
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Perencanaan dan Program;
  - c) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, yang membawahi;
  - a) Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  - c) Seksi Perkebunan.
  - d)

- 4) Bidang Perikanan dan Kelautan, yang membawahi;
  - a) Seksi Perikanan Tangkap;
  - b) Seksi Perikanan Budidaya;
  - c) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Perikanan dan Kelautan.
- 5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membawahi ;
  - a) Seksi Pembibitan dan Produksi;
  - b) Seksi Kesehatan Hewan;
  - c) Seksi Kesmavet dan Pemasaran Hasil.
- 6) Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahi;
  - a) Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Kerawanan Pangan;
  - b) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
  - c) Seksi Peningkatan Daya Saing dan Penganekaragaman Pangan.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional;
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari :
  - a) UPTD Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
  - b) UPTD Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (IB).
  - c) UPTD Balai Benih Ikan (BBI).

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat dilihat pada Lampiran 1. Sebagai upaya mempercepat dan mempermudah masyarakat tani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam memperoleh pelayanan maka pada tiap kecamatan dibentuk Balai Penyuluh Pertanian (BPP).

### **2.1.3. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, maka tugas dan fungsi serta kedudukan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman sebagai pelaksana tugas urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, dijabarkan ke dalam uraian tugas dan fungsi dari Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian serta Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan juga Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD.

#### **2.1.3.1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan serta bidang perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan bidang perikanan;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan bidang perikanan;
- c. Pembinaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang pertanian, pangan dan perikanan;
- d. Pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan dan bidang perikanan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- c. Merumuskan LPPD, LKPJ, LkjiP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- d. Merumuskan program kerja tahunan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinasikan Sekretaris, para kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- f. Membina bawahan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas efisiensi dan efektif;
- g. Mengarahkan sekretaris, para kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan bagi atasan;

- j. Melaporkan kegiatan Dinas secara periodik sesuai dengan data, informasi dan laporan setiap bagian, bidang dan kelompok jabatan fungsional untuk disampaikan kepada atasan;
- k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **2.1.3.2. Sekretaris**

Tugas dan fungsi sekretaris melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, maka Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
- d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;

- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- h. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
- i. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
- j. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; dan
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dilingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Uraian tugas Sekretaris ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Program dan Sub Bagian Keuangan;
- c. Mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas;

- l. Menganalisa kebutuhan pegawai pada Dinas;
- m. Membagi jumlah seluruh pelaksana Dinas untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
- n. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
- o. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Memberi saran dan pertimbangan teknis pada atasan;
- q. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan asset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- c. Pengelolaan asset, urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- d. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. Penyiapan bahan koordinasi bidang ketatausahaan

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- e. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;
- f. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;
- h. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personil lingkup Dinas;
- j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- k. Menyiapkan, mengkoordinasikan dan menyusun peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- f. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalanb lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan;
- h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- i. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur di Sub Bagian; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

## **B. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi dibidang keuangan;
- b. Pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan bahan verifikasi, penatausahaan, dan perbendaharaan;

- c. Pengelolaan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- d. Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
- b. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang;
- c. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- d. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- e. Menyiapkan SPM lingkup Dinas;
- f. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
- g. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Dinas;
- h. Menyelenggarakan verifikasi, pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Sub Bagian Perencanaan dan Program**

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Perencanaan dan Program melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan evaluasi, pemantauan dan penilaian kinerja;
- c. Pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; dan
- e. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Program ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
- b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran;

- d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran, melaksanakan evaluasi, pemantauan dan penilaian kinerja;
- e. Melaporkan pelaksanaan program dan anggaran;
- f. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Menyiapkan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
- h. Melaksanakan pelaporan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- i. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- j. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.3.3. Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan**

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, sarana prasarana, kelembagaan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan kebijakan perbenihan, produksi, sarana prasarana, kelembagaan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;

- c. Pemberian bimbingan teknis di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Pemantauan dan evaluasi di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, sarana prasarana, kelembagaan, perlindungan dan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengawasan serta pembinaan dalam hal sarana prasarana/mekanisasi pertanian dan kelembagaan;
- d. Melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih dibidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksidi bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Malaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Memberikan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. Memantau dan mengevaluasi di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan; dan

- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**A. Seksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura**

Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi dan perlindungan tanaman di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi dan perlindungan tanaman di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan produksi dan perlindungan tanaman dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan perlindungan tanaman di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pemantauan dan evaluasi produksi dan perlindungan tanaman di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan/perbibitan, perlindungan tanaman dan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Melakukan penyiapan bahan kebijakan perbenihan/perbibitan, produksi dan perlindungan tanaman di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih serta melakukan pengawasandan pengujian terhadap mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Melakukan sertifikasi benih, penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- f. Melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dan perlindungan tanaman di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Melakukan penyiapan bahan dan memberikan bimbingan produksi benih, kelembagaan benih, perlindungan tanaman serta kelembagaan OPT;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan tanaman pangan dan hortikultura; dan

- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Pertanian**

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang kelembagaan dan sarana prasarana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana;
- c. Pemberian bimbingan teknis di bidang kelembagaan dan sarana prasarana;
- d. Pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan sarana prasarana;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pertanian tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan dan sarana dan prasarana;

- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier, pupuk, pestisida dan alsintan;
- d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. Menghitung dan menyusun rencana kebutuhan alsintan, pupuk dan pestisida serta melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan alsintan, pupuk dan pestisida;
- g. Melakukan penyiapan bahan bimbingan, fasilitasi dan pemberdayaan seluruh kelembagaan pertanian (poktan, gapoktan, KTNA, LKMA, P3A, GP3A, UP3HP dll);
- h. Memberikan rekomendasi perizinan usaha-usaha pertanian;
- i. Melakukan bimbingan penerapan teknologi pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Seksi Perkebunan**

Seksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi produksi dan perlindungan tanaman di bidang tanaman perkebunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan produksi dan perlindungan tanaman di bidang tanaman perkebunan;

- b. pemberian bimbingan teknis produksi dan perlindungan tanaman di bidang perkebunan;
- c. pemantauan dan evaluasi produksi dan perlindungan tanaman di bidang perkebunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Perkebunan tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Tanaman Perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan/perbibitan, perlindungan tanaman dan peningkatan produksi di bidang tanaman perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan perbenihan/perbibitan, produksi dan perlindungan tanaman di bidang tanaman perkebunan;
- d. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih serta melakukan pengawasandan pengujian terhadap mutu benih perkebunan;
- e. Melakukan sertifikasi benih, penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- f. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman perkebunan;
- g. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman perkebunan;
- h. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya dan perlindungan tanaman di bidang tanaman perkebunan;
- i. melakukan penyiapan bahan dan memberikan bimbingan produksi benih, kelembagaan benih, perlindungan tanaman serta kelembagaan OPT;

- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan tanaman perkebunan; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya dan fungsinya.

#### **2.1.3.4. Bidang Perikanan dan Kelautan**

Bidang Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan perikanan tangkap. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
- b. pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di bidang perikanan dan Kelautan;
- c. pelaksanaan pengoperasian pengelolaan usaha perikanan dan Kelautan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan usaha perikanan dan Kelautan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Bidang Perikanan dan Kelautan ditetapkan sebagai berikut:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan usaha perikanan dan kelautan;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan teknologi dan bina mutu hasil perikanan;

- d. melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- e. melaksanakan kebijakan pengelolaan usaha perikanan;
- f. melaksanakan kebijakan pengembangan teknologi dan bina mutu hasil perikanan;
- g. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
- h. pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di bidang perikanan;
- i. pelaksanaan pengoperasian pengelolaan usaha perikanan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan usaha perikanan;
- k. melaksanakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan bidang perikanan;
- l. memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja Kasi di lingkungan bidang perikanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **A. Seksi Perikanan Tangkap**

Seksi Perikanan Tangkap melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
- b. pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di bidang perikanan tangkap;
- c. pelaksanaan pengoperasian pengelolaan usaha perikanan tangkap;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Seksi Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai berikut:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan usaha perikanan tangkap;
- c. melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan teknologi dan bina mutu hasil perikanan tangkap;
- d. melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- e. melaksanakan kebijakan pengelolaan usaha perikanan tangkap;
- f. melaksanakan kebijakan pengembangan teknologi dan bina mutu hasil perikanan tangkap;
- g. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
- h. pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di bidang perikanan tangkap;
- i. pelaksanaan pengoperasian pengelolaan usaha perikanan tangkap;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan usaha perikanan tangkap;
- k. melaksanakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan bidang perikanan tangkap;
- l. memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja staf dilingkungan bidang perikanan tangkap; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## **B. Seksi Perikanan Budidaya**

Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha

kecildan pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan Perikanan Budidaya;
- b. pemantauan/monitoring dan pengendalian pemanfaatan Perikanan Budidaya;
- c. rehabilitasi kawasan Perikanan Budidaya;
- d. pengelolaan administrasi data produksi Perikanan Budidaya;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan seksi Perikanan Budidaya;
- f. evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Seksi Perikanan Budidaya di tetapkan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data, mengidentifikasi, menganalisis, penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan Perikanan Budidaya;
- b. melaksanakan kebijakan pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan perikanan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi Perikanan Budidaya berpedoman pada rencana strategis dinas;
- e. melaksanakan identifikasi, perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian, pelaksanaan dan evaluasi tentang

- pemantauan/monitoring Perikanan Budidaya, data produksi, lingkungan perairan, mangrove dan restocking;
- f. melaksanakan pemantauan/monitoring dan pengendalian pemanfaatan Perikanan Budidaya (restocking, penanaman mangrove, tanaman pantai, dll);
  - g. melaksanakan rehabilitasi kawasan Perikanan Budidaya;
  - h. pengelolaan administrasi data produksi Perikanan Budidaya;
  - i. melaksanakan pemantauan dan pelaporan informasi pasar produksi Perikanan Budidaya;
  - j. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan seksi Perikanan Budidaya;
  - k. melaksanakan bimbingan teknis terkait dengan seksi Perikanan Budidaya;
  - l. membuat evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**C. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Perikanan dan Kelautan**

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas dalam melakukan penyiapan bahan dalam penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantuan serta evaluasi di bidang kelembagaan dan sarana prasarana perikanan dan kelautan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Penguatan Daya Saing;

- b. kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi bagi nelayan dan pengolahan ikan;
- c. pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan, penguatan promosi dan keberlanjutan usaha Kelautan dan Perikanan;
- d. melaksanakan pembinaan peningkatan konsumsi ikan masyarakat;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis teknologi pengolahan ikan dan peningkatan mutu produk Kelautan dan Perikanan; dan
- f. evaluasi dan pelaporan teknologi perikanan, dan bina mutu hasil perikanan.

Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Perikanan dan Kelautan ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kelembagaan dan sarana prasarana perikanan dan kelautan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana perikanan dan kelautan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan, penangkapan ikan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, optimilisasi dan pengendalian kelembagaan dan sarana prasarana perikanan dan kelautan;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tingkatan kelembagaan dan sarana prasarana perikanan dan kelautan;
- f. melakukan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan, penangkapan ikan, pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
- g. melaksanakan sosialisai dan desiminasi teknologi anjuran di bidang kelembagaan dan sarana prasarana perikanan dan kelautan;

- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan sarana dan prasarana budidaya perikanan, penangkapan ikan, pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan sarana prasarana perikanan dan kelautan;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.3.5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- e. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Uraian tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;

- b. mengelola sumber daya genetik hewan;
- c. merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. mengendalikan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. mengawasi peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. mengawasi pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. memberikan izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **A. Seksi Pembibitan dan Produksi**

Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pembibitan dan Produksi menyelenggarakan fungsi fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- b. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;

- c. penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT; dan
- d. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian; dan
- e. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, Pakan, dan Produksi di Bidang Peternakan.

Uraian tugas Seksi Pembibitan dan Produksi ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembibitan dan Produksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. melakukan penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak; melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- i. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembibitan dan Produksi di Bidang Peternakan; dan
- j. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. Seksi Kesehatan Hewan**

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- b. penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- c. fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- d. penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan; dan
- e. penyiapan bahan penerbitan izin/ rekomendasi ushadistributor obat hewan.

Uraian tugas Seksi Kesehatan Hewan ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;

- f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;
- k. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran**

Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugasm melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- c. menganalisa resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- d. penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis; dan

- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.

Uraian tugas Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- q. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
- r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **2.1.3.6. Bidang Ketahanan Pangan**

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di ketahanan pangan;
- d. bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketahanan pangan;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan pangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketahanan pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan pangan;
- b. melaksanakan penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di ketahanan pangan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis di bidang ketahanan pangan;
- e. melaksanakan supervisi di bidang ketahanan pangan;
- f. menyiapkan pemantapan program di bidang ketahanan pangan;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- h. menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan pangan;
- i. melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketahanan pangan;
- k. menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **A. Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Keamanan Pangan**

Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Keamanan Pangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan dan ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- c. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangandan kerawanan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- i. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) dan ketersediaan pangan;
- j. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- k. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan dan kerawanan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan

- m. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganeekaragaman dan konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- n. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganeekaragaman dan konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- o. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- p. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan**

Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di seksi Distribusi dan Cadangan Pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakandi bidang distribusi dan cadangan pangan;
- c. pemberian bimbingan teknis distribusi dan cadangan pangan;
- d. pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Distribusi dan Cadangan Pangan.
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
- c. melakukan analisis dan kajian distribusi, pasokan dan harga pangan.
- d. Melaksanakan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data jaringan distribusi, pasokan dan harga pangan
- e. Memfasilitasi pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pembinaan cadangan pangan daerah.
- f. melakukan pembinaan dan pengembangan distribusi dan cadangan pangan pokok daerah dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
- g. melakukan pemantauan dan koordinasi harga pangan.
- h. Melaksanakan sosialisasi, informasi, promosi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok.
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Seksi Peningkatan Daya Saing (PDS) dan Keanekaragaman Pangan**

Seksi Peningkatan Daya Saing (PDS) dan Keanekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganeekaragaman dan konsumsi pangan. Untuk melaksanakan tugas

tersebut Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan;
- c. pemantapan di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan;
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberi atasan sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Seksi Peningkatan Daya Saing (PDS) dan Keanekaragaman Pangan ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangkapromosi penganekaragaman dan konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman dan konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman dan konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga dan pengembangan pangan pokok lokal;
- j. melakukan penghitungan angka konsumsi per komoditas, tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapitaper tahun; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **2.1.3.7. Unit Pelaksana Dinas (UPTD)**

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPT pada dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan tersebut telah dibentuk tiga UPT di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dengan Perwako Pariaman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Pariaman yaitu :

- 1. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pariaman;
- 2. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan;
- 3. UPT Balai Benih Ikan (BBI).

#### **A. UPT BPPP Kota**

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional dan atau kegiatan penunjang di bidang Penyuluhan Pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Kota baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Membagi tugas kepada sub bagian tata usaha dan bawahan sesuai dengan bidang tugasnya melalui disPusatasi atau secara lisan.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Kota dan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- d. Mengkoordinasikan para bawahan melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas.
- e. Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja bawahan agar sesuai dengan rencana dan sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir.
- f. Mengadakan kerjasama unit kerja terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan di UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Kota.
- g. Mengatur sarana dan metode penyebarluasan informasi di UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Kota.

- h. Memberi saran kepada atasan mengenai permasalahan di UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Kota sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan.
- i. Menyusun dan membuat laporan kegiatan UPTD Balai Penyuluhan Pertanian Kota baik rutin maupun pembangunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

## **B. UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan**

UPT Pusat Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis, operasional dan atau kegiatan penunjang di bidang Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan dan Rumah Potong Hewan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut UPT Puskesmas, IB dan RPH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan program dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan operasional Puskesmas, Pos IB dan RPH
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program Puskesmas dan Pos IB dan RPH
- c. Menyusun rencana kegiatan tahunan Puskesmas, Pos IB dan RPH sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijaksanaan teknis lembaa pemerintah terkait
- d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional Puskesmas, Pos IB dan RPH dengan kepala dinas
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam penyelenggaraan tugas Puskesmas, Pos IB dan RPH

- f. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan
- g. Mengendalikan dan mengkaji semua kegiatan satuan organisasi Puskesmas, Pos IB dan RPH
- h. Memelihara alat yang ada di Puskesmas, Pos IB dan RPH
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Puskesmas, Pos IB dan RPH
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang akan ditetapkan
- k. Mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- l. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada kepala dinas
- n. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. UPT Balai Benih Ikan**

UPT Balap Benih Ikan (BBI) dipimpin oleh Kepala BBI dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Balai Benih Ikan, yaitu melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis Balai Benih Ikan yang meliputi operasional Balai Benih Ikan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala UPTD. Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan operasional UPTD. Balai Benih Ikan;

- b. Mengkoordinasikan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara lisan dan tulisan agar bawahan mengerti dan memahami tugasnya masing-masing;
- d. Mengawasi kegiatan bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi permasalahannya;
- e. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- f. Melaksanakan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Mengadakan kerjasama unit kerja terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan di UPTD. Balai Benih Ikan ;
- h. Mengatur sarana dan metode penyebarluasan informasi di UTPD Balai Benih Ikan;
- i. Memberikan saran kepada atasan mengenai permasalahan di UPTD. Balai Benih Ikan, sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan;
- j. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik.

### **C.1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BBI**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha BBI mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kegiatan ketatausahaan UPTD. Balai Benih Ikan dalam arti melaksanakan administrasi umum

dan kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan ketatausahaan, urusan hukum, organisasi tatalaksana, kehumasan, evaluasi dan pelaporan serta bimbingan teknis tenaga fungsional.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha BBI ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengendalian surat masuk, surat keluar dan kearsipan;
- b. Melaksanakan pengendalian barang dan perlengkapan UPTD. Balai Benih Ikan;
- c. Melaksanakan penyiapan administrasi pengaturan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan UPTD. Balai Benih Ikan;
- d. Melaksanakan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyiapan data dan informasi menyangkut kegiatan di lingkungan UPTD. Balai Benih Ikan;
- f. Menyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran serta pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan kepustakaan UPTD. Balai Benih Ikan;
- g. Mengadakan kerjasama unit kerja terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan UPTD. Balai Benih Ikan;
- h. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan aset-aset dan barang di lingkungan UPTD. Balai Benih Ikan;
- i. Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan disetiap bagian di lingkungan UPTD. Balai Benih Ikan;
- j. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas terlaksana dengan baik.

#### **2.1.3.8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dalam melaksanakan tugasnyaberada di bawah danbertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan bebankerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan telah mempunyai kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari:

1. Penyuluh Pertanian,
2. Penyuluh Perikanan,
3. Medik Veteriner,
4. Pengawas Perikanan, dan
5. Operator Komputer.

#### 2.1.4. Uraian Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Yang Ditujukan Untuk Menunjukkan Organisasi, Jumlah Personil, dan Tata Laksana Perangkat Daerah

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman memiliki sumber daya manusia dengan jumlah personil sebanyak 116 orang yang terdiri dari 86 orang PNS, 9 orang CPNS dan 23 orang non PNS, dimana jenjang pendidikan serta kepangkatan masing-masing personil dinas dapat dijelaskan sebagaimana terdapat dalam tabel 2.1.

Tabel. 2.1. Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan serta Jenjang Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah	Pangkat/ Ruang	Jumlah	Pendidikan Formal
<b>A. Jabatan Struktural</b>					
1.	Kepala Dinas	1	Pembina Tk.I/IV.b	1	S1
2.	Sekretaris	1	Pembina/IV.a	1	S2
3.	Kepala Bidang	4	Pembina/IV.a	1	S2
			Pembina/III.a	1	S1
			Penata Tik.i/III.d	2	S2
4.	Kasubbag	3	Pembina/IV.a	1	S2
			Pembina/IV.a	1	S2
			Penata/III.c	1	S1

5.	Kepala Seksi	12	Penata Tk.I/III.d	1	S2
			Penata Tk.I/III.d	5	S1
			Penata/III.c	5	S1
			Penata Muda Tk.I/III.b	1	S1
6.	Kepala UPT	3	Pembina/IV.a	1	S1
			Penata Tk.I/III.d	1	SLTA
			Penata/III.c	1	S1
7.	Kasubbag TU	3	Penata/III.c	1	S1
			Penata Muda Tk.I/III.b	2	S1
8.	Staf	48	Pembina Tk.I/IV.b	2	S1
			Pembina/IV.a	1	S2
			Penata Tk. I/III.d	1	S2
			Penata Tk. I/III.d	6	S1
			Penata/III.c	1	S2
			Penata/III.c	4	S1
			Penata Muda Tk.I/III.b	7	S1
			Penata Muda Tk.I/III.b	1	D3
			Penata Muda/III.a	12	S1
No	Jabatan	Jumlah	Pangkat/ Ruang	Jumlah	Pendidikan Formal
			Penata Muda/III.a	4	D3
			Pengatur Tk.I/II.d	2	D3
			Pengatur Tk.I/II.d	1	SLTA
			Pengatur/II.c	3	
			CPNS/III.b	4	S1
			CPNS/II.c	5	D3
			Tenaga Kontrak (teknis)	3	S1
			Tenaga Kontrak (teknis)	3	D3
<b>B. Jabatan Fungsional</b>					
1.	Medik Veteriner	1	Pembina/IV.a	1	S1
2.	Penyuluh	34	Pembina/IV.a	2	S1
			Penata Tk.I/III.d	1	S2
			Penata Tk.I/III.d	1	S1
			Penata Tk.I/III.d	2	SLTA
			Penata/III.c	2	S1
			Penata Muda Tk.I/III.b	2	S1
			Penata Muda/III.a	1	D3
			Pengatur/II.d	1	D.3
			Tenaga Kontrak	14	S1
			Tenaga Kontrak	1	D3
			Tenaga Kontrak	3	SMA
3.	Pengawas Perikanan	1	Penata/III.c	1	S2

## 2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1. Sumberdaya Manusia Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan sektor pertanian dan sektor perikanan pada masa yang akan datang maka diperlukan sumberdaya manusia yang mencukupi secara kuantitas dan kualitas. Kondisi sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.2. sampai dengan Tabel 2.4.

Tabel. 2.2. Data Pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2019 Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	3
5.	Kepala Seksi	12
6.	Kepala UPTD	3
7.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	3
8.	Staf Dinas	48
9.	Staf UPT	
10.	Medik veteriner	1

11.	Fungsional Penyuluh Petanian	10
12.	Fungsional Penyuluh Perikanan	2
13.	Pengawas Perikanan	1
14.	Penyuluh Pertanian (Non PNS)	12
15.	Penyelia Mitra Tani (Non PNS)	2
16.	Penyuluh Perikanan Bantu (Non PNS)	6
17.	Tenaga Teknis Kontrak (Non PNS)	6
<b>Jumlah</b>		<b>115</b>

Tabel. 2.3. Data Pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2019 Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Tk.I/IV.b	1
2.	Pembina Tk.I / IV.b	2
3.	Pembina / IV.a	9
4.	Penata Tk.I / III.d	21
5.	Penata / III.c	16
6.	Penata Muda Tk.I / III.b	13
7.	Penata Muda / III.a	17
8.	Pengatur Tk.I / II.d	4
9.	Pengatur /II.c	3
10.	CPNS/Penata Muda Tk.I/III.b	4
11.	CPNS/Pangatur Muda Tk.I/II.b	5
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>

Tabel. 2.4. Data Pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata III	0
2.	Strata II	13
3.	Strata I	61
4.	Diploma IV	0
5.	Diploma III	16
6.	Diploma II	0
7.	Diploma I	0
8.	SLTA	5
9.	SLTP	0
10.	SD	0

---

<b>Jumlah</b>	<b>95</b>
---------------	-----------

### **2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program, kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan sektor pertanian, pangandan Perikanan.
- b. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat tani, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah serta pemasaran secara langsung maupun kepada instansi vertikal atau horizontal.

- c. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sektor pertanian, pangan dan perikanan yang bersumber dari dana APBD Kota, APBD Provinsi, atau APBN.

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman 5 (lima) Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>1.</b>	Peningkatan Pro-duksi Padi :						
	- Luas Panen	Ha	5.648	5.266	5.686	5.851	7.099
	- Produksi	Ton	28.711	31.260	32.093	31.047	41.834
	- Produktivitas (IP)	Kg/Ha	5,1	5,94	5,64	5,30	5,89
<b>2.</b>	Peningkatan pro-duksi Palawija :						
	- Jagung	Ton	328,5	180	237	209	219,3
	- Kacang Tanah	Ton	20,10	8	6,4	-	-
	- Kedele	Ton	4,5	-	-	-	-
	- Ubi Kayu	Ton	2,158	1,166	1,008	685	1,000
	- Ubi Jalar	Ton	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	Peningkatan pro-duksi Sayur2an :						
	- Kacang Panjang	Ton	43,1	95,3	30,0	22,0	16,7
	- Cabe Besar	Ton	55,8	91,1	35,9	40,8	19,4
	- Cabe Rawit	Ton	15,8	25,1	15,8	8,30	9,10
	- Kentimun	Ton	181,2	92,6	31,6	39,3	20,4
	- Terung	Ton	36,9				
	- Kangkung	Ton	60,6	48,4	62,0	15,3	8,2
	- Bayam	Ton	53,2	44,6	53,0	12,9	7,4
<b>4.</b>	Peningkatan pro-duksi buah2an :						
	- Pisang	Ton	2131,6	3007,7	3013,3	2693,6	1884,6
	- Pepaya	Ton	527	533,8	389,9	191,7	352,6
	- Jambu Biji	Ton	31,9	61,1	76,3	96,7	130,8
No.	Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
<b>5.</b>	Peningkatan pro-duksi Tanaman Perkebunan :						
	- Kelapa	Ton	2.256	1.967	1.053,8	1.985,7	2.979,5
	- Melinjo	Ton	1.615,9	1.100,1	1.832,2	2.028,7	1.030,5
	- Kakao	Ton	126	274,6	101,25	265,3	227,6
<b>6.</b>	Peningkatan Populasi Ternak :						
	- Sapi	Ekor	2.489	2.803	2.804	2.633	1.055
	- Kerbau	Ekor	500	612	589	1.709	195

- Kambing	Ekor	1.714	1.916	1.888	1.890	603
- Itik	Ekor	10.519	11.676	11.133	9.681	9.032
- Ayam Ras	Ekor	1.036.785	1.421.30	1.152.80	1.657.500	883.75
- Ayam Buras	Ekor	55.801	0	0	54.022	0
			63.251	58.310		52.630
<b>7. Peningkatan produksi :</b>						
- Daging Sapi	Kg	547.046,5	565.180	182.554	818.928	
- Daging Kerbau	Kg	37.510	67.987	16.842	55.413	
- Daging Kambing	Kg	6.526				
- Daging Ay Ras	Kg	1.968.959,	27.533	7.281	13.449	
- Daging Ay Buras	Kg	65	218.605	295.932	1.650.524	
- Telur Ayam Ras	Kg	-	61.014	63.644	66.386	
- Telur Ayam Buras	Kg	3.120	2.313	2.699	2.699	
- Telur Itik	Kg	38.920	31.823	33.195	34.625	
		56.745	-	-	48.087	
<b>8. Penurunan Kasus kematian hewan ternak</b>	Kasus	5%	5%	5%	5%	5%
<b>9. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Laut</b>						
- Nelayan Utama	Org					1.060
- Nelayan Sambilan	Org					123
- RTP	Unit					498
- Perahu Tanpa Motor	Unit					0
- Perahu Motor Tempel	Unit					345
- Kapal Motor	Unit					366
- Produksi	Ton		7.049,0	6.345,2	6.117,8	6.250,0
<b>10. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya :</b>						
- Luas Areal Budidaya	Ha	97,97	98,09	10,74	98,08	98,90

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
-	Luas Areal Mina Padi	Ha	0	0	0	0	0
-	Pembudidaya Penuh	Org			453	686	692
-	Pembudidaya Sambilan	Org			174	862	870
-	Rumah Tangga Pembudidaya Ikan	Unit					1.562

- Kelompok Pembudidaya Ikan	Buah	29	32	44	19	27
- Produksi	Ton	158,13	180,14	192,78	254,92	274,99
<b>11. Perkembangan Produksi Benih Ikan :</b>						
- UPR & PSRT	Unit	19	27	13	12	15
- Produksi Lele BBI	Ekor (000)					
- Produksi Nila BBI	Ekor (000)					
- Produksi Gurami BBI	Ekor (000)					
- Prodksi Lele UPR	Ekor (000)	2.969	4.708	3.520	8.359	8.700
- Produksi Nila UPR	Ekor (000)				0	0
- Produksi Gurami UPR	Ekor (000)				0	0
<b>12. Ikan Olahan dan pemasaran :</b>						
- Pedagang Besar	Org		10	15	15	13
- Pedagang Pengumpul	Org		6	10	7	7
- Pedagang Pengecer	Org		187	191	191	136
- UPI Penggaraman/Pengerin gan	Unit				32	26
- UPI Pengolahan Lainnya	Unit				31	16
- Penggaraman/ Pengerinan	Ton			299.200	299.200	151.542
- Pengolahan Lainnya	Ton			83.676	13.676	7.825,56
- Produk Pemasaran	Ton			6.784,82	6.105.96	4.870,2
<b>13. Produk Non Konsumsi :</b>						
- Kelompok PPNK	Unit					3
- Produksi	Unit					

Pada Tabel 2.8 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Padi :

Luas lahan sawah di kota Pariaman pada tahun 2013 tercatat 2523

Ha yang tersebar pada 4 kecamatan yang ada di kota Pariaman.

Dibandingkan dengan luas Kota Pariaman maka luas sawah yang

ada di Kota Pariaman sebesar 34,39%. Sebagian besar petani di Kota Pariaman berusaha tani dengan melaksanakan budidaya pada sawah. Oleh karena itu salah satu tujuan dan sasaran Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Pangan Kota Pariaman adalah Peningkatan Produksi Padi. Sejak tahun 2013 - 2018 telah dilaksanakan serangkaian Program dan Kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan Produksi Padi tersebut antara lain ; melalui demplot/Percontohan Tanaman Padi Sawah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2013 : SLPTT/SLPTS Padi Sawah
  - b. Tahun 2014 : SLPTT/SLPTS Padi Sawah
  - c. Tahun 2015 : SLPHT Padi Sawah
  - d. Tahun 2016 : SLPHT Padi Sawah
  - e. Tahun 2017 : SLPTH Padi Sawah
2. Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Palawija dilakukan dengan cara :
- a. Pengembangan Intensifikasi tanaman Palawija.
  - b. Pengembangan Diversifikasi tanaman.
3. Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Sayur-sayuran dilakukan dengan cara:
- a. Pengembangan perbenihan/perbibitan.
  - b. Pengembangan Bibit Unggul
4. Indikator Kinerja Peningkatan Produksi buah-buahan dilakukan dengan cara:
- a. Pengembangan tanaman buah-buahan.

5. Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan dilakukan dengan cara :
  - a. Melakukan Peremajaan Tanaman Kelapa.
  - b. Melakukan Penanaman Kakao.
  - c. Melakukan kegiatan buru tupai.
  - d. Pengendalian penyakit tanaman kakao.
  
6. Indikator Kinerja Peningkatan Populasi Ternak (Sapi,Kerbau,Kambing,Itik, Ayam Ras dan Ayam Buras) dilakukan dengan cara :
  - a. Promosi ternak unggulan.
  - b. Pengendalian Penyakit Hewan Menular.
  - c. Peningkatan prasarana dan sarana Pos Kesehatan Hewan.
  - d. Pemusnahan Ternak yang terjangkit penyakit endemik.
  - e. Pembibitan dan perawatan ternak (Sapi yang di IB)
  - f. Pendistribusian bibit ternak ke masyarakat
  
7. Peningkatan Indikator Peningkatan Produksi Ternak (Daging Sapi, daging Kerbau, daging Kambing, daging Ayam Ras, daging Ayam Buras, Telur Ayam Ras, Telur Ayam Buras dan Telur Itik) dilakukan dengan cara :
  - a. Demplot hijauan makanan ternak.
  - b. Pelatihan peternakan Sapi, Ayam Buras dan Itik (penggemukan).
  
8. Penurunan Kasus kematian hewan ternak dilakukan dengan cara:
  - a. Pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan Rabies.
  - b. Pengendalian Penyakit Hewan Menular.
  - c. Pencegahan dan penanggulangan penyakit Avian Influenza.
  - d. Pencegahan dan penanggulangan penyakit SE/ngorok
  - e. Eliminasi Anjing
  - f. Vaksinasi Anjing

g. Sosialisasi penyakit zoonosis.

9. Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dilakukan dengan :

- a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan melalui pelatihan dan bimbingan teknis
- b. Bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap
- c. Pembinaan dan pembentukan kelompok nelayan;
- d. Mendorong nelayan sambilan untuk menjadi nelayan utama

Produksi perikanan tangkap Kota Pariaman tahun 2014 adalah 7.049,0 ton dan tahun 2017 adalah 6.250,0 ton, dimana terdapat kecenderungan penurunan produksi disebabkan adanya peralihan profesi nelayan ke pengangkut dan pemandu wisatawan ke pulau-pulau kecil di perairan Kota Pariaman.

10. Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Areal pembudidayaan ikan terdiri dari budidaya ikan di air tawar, perairan payau dan budidaya laut. Areal pembudidayaan yang terdapat di Kota Pariaman adalah budidaya ikan di kolam, keramba (sangkar) dan di sawah (mina padi), sementara budidaya ikan air payau dan budidaya laut belum berkembang. Oleh karena indikator peningkatan produksi perikanan budidaya di Kota Pariaman ditinjau dari produksi tahun 2013 tercatat 97,97 Ha dan pada tahun 2017 tercatat 98,90 Ha yang tersebar pada 4 kecamatan yang ada di kota Pariaman. Pembudidaya ikan di kota Pariaman melakukan pembudidayaan ikan di kolam, keramba dan di sawah bersamaan dengan padi yang dikenal dengan mina padi. Sejak tahun 2013 - 2018 telah dilaksanakan serangkaian Program dan Kegiatan yang

bertujuan untuk peningkatan produksi ikan budidaya antara lain melalui pemberian pelatihan dan demplot budidaya ikan di sawah (minapadi) dan karamba. Sehingga indikator kinerja produksi perikanan budidaya dilakukan dengan indikasi sebagai berikut:

- a. Membina masyarakat unyuk melakukan usaha budidaya ikan (kolam, sawah dan karamba);
- b. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan cara budidaya ikanyang baik (CBIB);
- c. Memberikan bantuan benih ikan;
- d. Memberikan bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
- e. Membina dan mendorong pembudidaya ikan untuk berkelompok dalam kelompok pembudidaya ikan (pokdakan);

11. Indikator Kinerja Perkembangan Produksi Benih Ikan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Membina dan memantau pembenih skala rumah tangga (PSRT) dan unit pembenihan rakyat (UPR);
- b. Memberi bantuan calon induk ikan;
- c. Memberikan pelatihan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);

12. Indikator Kinerja Ikan Olahan dan pemasaran dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Memantau kegiatan pengolahan ikan dan pemasaran;
- b. Memberikan pelatihan cara/teknik pengolahan dan pemasaran ikan;
- c. Memberikan bantuan sarana pengolahan ikan yang baik dan higienis;
- d. Membangun prasarana pemasaran.

13. Indikator Kinerja Produk Non Konsumsi dari ikan dilakukan dengan cara :

- a. Penumbuhan kelompok yang memproduksi produk perikanan non konsumsi.

Prestasi/penghargaan yang pernah diperoleh oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9. Prestasi/penghargaan yang Diperoleh oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman

No.	Jenis Penghargaan /Prestasi	Pemberi	Tingkat		Tahun
			Propinsi	Nasional	
1..	Penerima ISO 9001 Manajemen mutu dan pelayanan untuk UPT Puskesmas, IB dan RPH yang diserahkan oleh Direktur Keswan Kesmavet Dirjen Peternakan Kementan RI agustus 2017	Menteri Pertanian		√	2017
2.	Juara harapan I lomba TTG tingkat nasional dalam rangka PENAS XIV di Aceh Mei 2017	Menteri Pertanian		√	2017
3.	Harapan III Rumah Makan Pendukung Program GEMARIKAN	Gubernur Sum. Barat	V		2017
4.	Satya Lencana Wirakarya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan Pengembang dan Pembangunan Kelautan	Menteri Kelautan dan Perikanan		V	2017
5.	BPP Berprestasi (juara 1) tingkat provinsi Sumatera Barat	Gubernur Sum. Barat	√		2018
6.	Petani Berprestasi (juara 2 ) tingkat provinsi Sumatera Barat	Gubernur Sum. Barat	√		2018

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.4.1. Tantangan

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam Mewujudkan Visi dan Misi Beliau

sesuai dengan bidang tugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang diamanatkan dalam peraturan daerah dan peraturan walikota. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dihadapkan pada tantangan ke depan yaitu:

- a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan kawasan perdagangan dan perkantoran
- b. Keterbatasan prasarana dan sarana produksi pertanian;
- c. Semakin meningkatnya harga saprodi;
- d. Faktor iklim (perubahan cuaca ekstrim);
- e. Rendahnya motivasi petani untuk penerapan teknologi baru;
- f. Penyakit hewan menular strategis;
- g. Kegiatan usaha perikanan masih kurang dalam permodalan dan teknologi.
- h. Produktivitas kolam para pembudidaya ikan belum optimal.
- i. Belum optimalnya sarana dan prasarana produksi perikanan, pemasaran hasil produk olahan perikanan, penangkapan ikan.
- j. Penurunan SDA penangkapan ikan.
- k. Alih fungsi lahan potensial budidaya ikan.
- l. Kurang optimalnya sumber daya manusia pelaku usaha sector perikanan.
- m. Belum optimalnya penerapan metode CBIB, CPIB dan CPPIB dalam perikanan budidaya.
- n. Masih kurangnya produk olahan hasil perikanan ditinjau dari segi higienitas dan sanitasi.
- o. Masih kurangnya kualitas, kuantitas dan pemasaran produk non konsumsi.

### **2.4.2. Peluang**

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, perlu memanfaatkan secara optimal peluang-peluang yang ada diantaranya:

- a. Kebijakan yang di ambil dalam rangka mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman mengembangkan model pertanian perkotaan yaitu melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan dalam lahan sempit, sehingga keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk usaha dibidang pertanian.
- b. Pengolahan hasil pertanian (Agro Industri)
- c. Pengembangan Agrowisata
- d. Tersedianya akses pasar
- e. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian
- f. Adanya komoditi unggulan daerah
- g. Berkembangnya pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- h. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepadadaerah untuk melakukan pengelolaan potensi perikanan di daerahnyaseusai dengan pembagian kewenangan dalam Undang-undang Nomor23 Tahun 2014.
- i. Perkembangan teknologi anjuran dan terapan bidang perikanan.
- j. Terbukanya peluang pasar bagi produk perikanan konsumsi dan non konsumsi baik di tingkat lokal, regional, nasional dan global.
- k. Pemanfaatan perairan umum dan laut disekitarnya menunjang ekowisata yang terintegrasi dengan perikanan.

- l. Ketersediaan lahan yang sesuai untuk pengembangan budidaya perikanan.
- m. Tingginya permintaan pasar terhadap benih ikan dari dalam maupun luar daerah KotaPariaman.
- n. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta tenaga penyuluhperikanan sebagai ujung tombak dalam pembangunan sektor perikanan di Kota Pariaman.
- o. Kawasan Muara Sunur ditetapkan sebagai pencadangan untuk Pangkalan Pendaratan Ikan.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN**

### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan. Kebijakan dan strategi yang diambil di sektor pertanian, pangan dan perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi perikanan serta mutu dan kualitas hasil pertanian dan perikanan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

a. Faktor Internal

- 1) Terbatasnya sumberdaya aparatur;
- 2) Suasana dan lingkungan kerja kurang dinamis;
- 3) Lemahnya budaya dan etos kerja;

b. Faktor Ekternal, meliputi :

- 1) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian, potensial budidaya perikanan menjadi pemukiman dan kawasan perdagangan dan perkantoran

- 2) Keterbatasan sarana produksi pertanian dan perikanan;
- 3) Semakin meningkatnya harga saprodi dan saprokan;
- 4) Faktor iklim
- 5) Rendahnya motivasi petani, nelayan dn pembudidaya ikan untuk penerapan teknologi baru
- 6) Kurangnya keaktifan kelembagaan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan;
- 7) Kurangnya pemuda pada sektor pertanian dan perikanan sehingga pelaku usaha pertanian dan perikanan didominasi oleh orang yang berusia lanjut;
- 8) Masih terdapatnya nelayan menggunakan alat tangkap tradisional dan sederhana;
- 9) Masih lemahnya kesadaran nelayan dalam menjaga dan mengawasi sumberdaya ikan dari pencurian;
- 10) Masih tingginya konflik wilayah antara nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- 11) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pemasaran hasil olahan produk perikanan;
- 12) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat sektor perikanan melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia maupun pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan;

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada masa yang akan datang. Sedangkan misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinsikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi.

Adapun visi Kota Pariaman Tahun 2018 – 2023 adalah "*Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa yang Religius dan Berbudaya*". Visi ini memiliki pengertian sebagai berikut:

Kota Wisata : *Kota Pariaman diarahkan sebagai kota tujuan wisata baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Dengan gerakan menyatukan seluruh potensi daerah maupun stakeholder dalam menyediakan sarana pariwisata dan prasarana wisata atau fasilitas umum sehingga menarik wisatawan yang datang kedistinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat*

- Perdagangan & Jasa : Kota Pariaman Akan Menjadi Kota Perdagangan Jasa yang hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Pariaman. Kota Pariaman yang hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan serta terhadap PDRB yang semakin meningkat serta nilai investasi yang semakin besar
- Religius : Masyarakat pariaman meyakini kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama islam dan menghormati nilai-nilai agama lain serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakannya nyata dalam keseharian, dalam menjunjung tinggi toleransi, kepedulian dalam menjalani kehidupannya
- Berbudaya : Setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, tradisi dan adat istiadat, kearifan lokal norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang

*diwujudkan dengan perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan*

Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius dan Berbudaya maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan wisata kota yang maju, religius, tertib dan berbudaya;
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas;
3. Mewujudkan pemerintah yang handal dan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Mewujudkan kota pesisir modern, dinamis dan berwawasan lingkungan hidup,;
5. Memperkuat ekomoni kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat;

Berdasarkan kelima misi sebagaimana tersebut diatas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kota Pariaman maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman berperan mewujudkan misi kelima yaitu *“Memperkuat ekomoni kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal dan budaya masyarakat”*.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI**

Perencanaan strategis tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat kota saja melainkan harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh pemerintahan tingkat propinsi maupun pusat yaitu Renstra Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Badan Ketahanan Nasional.

#### **3.3.1. Kementerian Pertanian dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat**

##### **A. Kementerian Pertanian**

Visi kementerian pertanian tahun 2014 – 2019 adalah : *terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani*. Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.

Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi;
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian;
- c. Mewujudkan Kesejahteraan Petani;
- d. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian yang ingin dicapai adalah :

- b. Terwujudnya swasembada padi, jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula;
- c. Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan;
- d. Bergesernya budaya konsumsi pangan;
- e. Meningkatnya stabilisasi produksi dalam rangka stabilisasi harga;
- f. Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi;
- g. Mendorong majunya agrobioindustri;
- h. Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani;
- i. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

**B. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat**

Visi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat adalah Visi : “TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN PANGAN DAN RUMAH TANGGA PETANI YANG SEJAHTERA”. Dengan misi :

- a. Meningkatkan produksi pertanian;
- b. Meningkatkan peluang pasar produk pertanian;
- c. Mengembangkan pertanian ramah lingkungan dan pertanian organik;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana pertanian.

Dengan Tujuan Jangka Menengah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya kebutuhan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Memperluas peluang pasar produk tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan pembangunan pertanian berkelanjutan;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian.

Dengan sasaran strategis

- a. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Unfeminine luas serangan yang disebabkan oleh serangan OPT dan bencana alam;
- c. Meningkatnya nilai tambah komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Berkembangnya pertanian organik yang dilandasi kehidupan organis sejahtera dan lestari, serta ratio pemakaian agroinput luar yang rendah.

Dimana Rencana Strategisnya disusun sebagai berikut :

- a. Meningkatnya produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Meningkatkan pengendalian terhadap serangan OPT, bencana alam;
- c. Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Meningkatkan daya saing komoditi unggulan melalui pengembangan agroindustry;
- e. Berkembangnya pertanian organik yang dilandasi kehidupan organis sejahtera dan lestari, serta ratio pemakaian agroinput luar yang rendah;

- f. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana lahan, air dan alsintan.

Adapun Kebijakan Pembangunan Pertanian yang disusun sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura komoditi unggulan.
- b. Meningkatkan efisiensi usahatani dan mutu produksi.
- c. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien.
- d. Pengembangan kawasan sentra produksi, agribisnis.
- e. Meningkatkan pemberdayaan aparatur, pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan.
- f. Meningkatkan pemberdayaan petani.
- g. Mengembangkan usaha-usaha peningkatan nilai tambah komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan.
- h. Pengembangan komoditi unggulan yang berdaya saing.
- i. Bertambahnya luasan pertanian organik.
- j. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana, lahan air dan alsintan. Mengembangkan LKMA di pedesaan.

### **C. Dinas Peternakan Provinsi Sumbar**

Visi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat adalah : *SUMBAR sebagai Sentra Pengembangan Ternak Unggul untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Hewani dan Kesejahteraan Masyarakat Peternakan.* Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat mengemban misi :

- a. Mengembangkan kawasan utama ternak unggul yang ditetapkan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
- b. Meningkatkan produksi ternak dan konsumsi pangan asal hewan di Sumatera Barat
- c. Mendukung terciptanya sistem produksi dan distribusi pangan asal hewan yang efisien dengan kualitas yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) secara berkelanjutan.
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat peternakan
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan peternakan
- f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat peternakan
- g. Mengembangkan kelembagaan sosial dan ekonomi peternakan
- h. Menerapkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dalam bidang peternakan

#### **D. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat**

Visi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah :“ *Menjadi Institusi yang handal dalam memantapkan kemandirian pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal.*

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat mengemban misi :

- a. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat yang aman berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- b. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumber daya dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta penanganan kerawanan pangan.
- c. Mewujudkan sistem distribusi pangan dan memupuk cadangan pangan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan.

- d. Mengembangkan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan yang Dikelola Secara Profesional Berbasis Agribisnis dan Memiliki Daya Saing Tinggi.
- e. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan kemandirian pangan

**3.3.2. Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat**

Adapun permasalahan pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman berdasarkan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disajikan dalam table 3.1 dan tabel 3.2.

Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KKP	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Pariaman	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kapasitas sentra produksi yang memiliki komoditas unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penurunan kualitas lingkungan budidaya</li> <li>➢ Maraknya alih fungsi lahan budidaya untuk kegiatan non budidaya</li> <li>➢ Kurang tersedianya benih ikan unggul</li> <li>➢ Adanya serangan penyakit pada ikan</li> <li>➢ Kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kurangnya kesadaran pembudidaya ikan dalam memanfaatkan benih unggul</li> <li>➢ Penerapan CBIB dan CPIB yang belum optimal sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit ikan</li> <li>➢ Jalur/alur penangkapan ikan yang kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pemberian bantuan benih ikan unggul</li> <li>➢ Sosialisasi dan sertifikasi CBIB dan CPIB bagi pembudidaya dan pembenih ikan</li> <li>➢ Pemberian alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan modern</li> <li>➢ Pemberian bantuan sarana alat</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KKP	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Pariaman	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<p>dimengerti dan difami oleh nelayan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penangkapan ikan masih menggunakan peralatan yang sederhana</li> </ul>	<p>bantu penangkapan ikan</p>
2.	Meningkatnya pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tingginya biaya operasional baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dibanding dengan harga hasil budidaya dan penangkapan ikan yang fluktuatif</li> <li>➤ Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum optimalnya bantuan maupun subsidi guna menekan tingginya biaya operasional</li> <li>➤ Masih rendahnya tingkat kepercayaan perbankan terhadap pelaku usaha perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menggalakan program penggunaan pakan ikan mandiri bagi pembudidaya ikan</li> <li>➤ Konversi peralatan/me sin produksi budidaya maupun penangkapan ikan dari BBM ke gas</li> <li>➤ Pemberian bantuan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan dan nelayan</li> </ul>
3.	Meningkatnya ketersediaan hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gerakan Gemar makan ikan</li> <li>➤ Lomba cipta menu kreasi ikan</li> <li>➤ Pembentukan forum Forikan</li> </ul>
4.	Meningkatnya mutu keamanan produk perikanan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Relatif rendahnya mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan</li> <li>➤ Masih rendahnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih rendahnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fasilitasi terhadap pengolahan ikan untuk memperoleh perizinan P-</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KKP	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Pariaman	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pengetahuan dan kemampuan para pelaku pengolahan ikan dalam diversifikasi hasil olahan produk perikanan	dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar ➤ Sebagian besar hasil produk olahan perikanan belum memiliki sertifikasi izin standar dan sertifikasi halal	IRT dan sertifikat halal

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Pariaman berdasarkan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat serta faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DKP Sumbar	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Pariaman	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penurunan kualitas lingkungan budidaya</li> <li>➤ Maraknya alih fungsi lahan budidaya untuk kegiatan non budidaya</li> <li>➤ Kurang tersedianya benih ikan unggul</li> <li>➤ Adanya serangan penyakit pada ikan</li> <li>➤ Kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurangnya kesadaran pembudidaya dalam mempergunakan benih unggul</li> <li>➤ Penerapan CBIB yang belum optimal sehingga masih ditemukan kasus serangan hama penyakit ikan</li> <li>➤ Jalur penangkapan ikan yang kurang dimengerti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemberian bantuan benih ikan unggul</li> <li>➤ Sosialisasi dan sertifikasi CBIB bagi pembudidaya ikan</li> <li>➤ Sosialisasi deteksi dan penanganan hama penyakit ikan</li> <li>➤ Pemberian alat penangkapan yang ramah lingkungan dan modern</li> <li>➤ Pemberian bantuan</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DKP Sumbar	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Pariaman	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			dan dipahami nelayan ➤ Penangkapan ikan masih menggunakan peralatan sederhana	sarana alat bantu penangkapan
2.	Meningkatnya pemasaran hasil perikanan	➤ Masih rendahnya kualitas dan nilai jual dari produk olahan hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Produk olahan hasil perikanan sebagian besar masih diproses dengan cara sederhana</li> <li>➤ Masih rendahnya diversifikasi jenis olahan hasil perikanan</li> <li>➤ Kurangnya keterampilan dan pengetahuan pengusaha pengolahan ikan yang baik dan benar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Banyaknya pelaku usaha pengolahan ikan berminat untuk mendapatkan pelatihan</li> <li>➤ Tumbuhnya wirausaha baru dibidang pengolahan ikan</li> <li>➤ Giat melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui sertifikasi</li> </ul>

### 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

#### 3.4.1. Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman 2010 – 2030 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang kota yaitu *mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien,*

*berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.*

Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, propinsi dan kota, serta sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038 disebutkan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Tujuan umum RZWP3K adalah untuk mewujudkan penataan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang serasi, selaras dan seimbang dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Tujuan khusus yang terdiri dari:

1. Tujuan Pembangunan Lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan;
2. Tujuan Pembangunan Sosial, yaitu membuat suatu panduan bagi semua stakeholder untuk ikut berperan serta dalam pemanfaatan ruang pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan;

3. Tujuan Pembangunan Ekonomi, yaitu mendorong pemanfaatan ruang pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan; dan
4. Tujuan Pembangunan Administratif, yaitu tersusunnya rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan RTRW Kota Pariaman 2010-2030 yang telah disebutkan diatas, pola ruang kota pariaman terdiri dari :

- kawasan lindung seluas 41,94 % (3.084 Ha) dari luas kota pariaman, dan
- kawasan budidaya seluas 58,06 % (4.270 Ha) dari luas kota pariaman.

Di kota Pariaman, lahan dapat digolongkan kedalam kelompok lahan produktif dan non produktif. Untuk pemanfaatan lahan produktif didominasi oleh kegiatan pertanian, perikanan, pemukiman dan prasarana wilayah. Untuk kegiatan pertanian dan perikanan lahan tersebut dimanfaatkan untuk :

- (1) sawah 2.523 Ha, termasuk mina padi ..... Ha.
- (2) kolam ikan 25,75 Ha,
- (3) Tegal/kebun 1.272 Ha,
- (4) ladang/huma 843 Ha,
- (5) perkebunan 302 Ha,
- (6) padang penggembalaan/rumput 78 Ha.

Selanjutnya untuk kegiatan di lahan non produktif seperti semak belukar (lahan terlantar) dengan luas 231 Ha, lahan bukan pertanian 853 Ha. Secara umum, lahan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini

disebabkan oleh masalah seperti; kepemilikan lahan, rendahnya IPTEK yang dimiliki oleh petani/nelayan/pembudidaya ikan dan pelaku agribisnis, lemahnya pengaturan irigasi dan sarannya, serta kurangnya permodalan pertanian.

Sumber daya air dan irigasi di Kota Pariaman sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk budidaya pertanian dan perikanan padi sawah dan mina padi 1.785 Ha dan kolam ikan 25,75 Ha. Penggunaan lahan untuk budidaya pertanian padi sawah dan mina padi yang terluas terletak di kecamatan Pariaman Selatan (560 Ha). Sedangkan yang terkecil terletak di kecamatan Pariaman Tengah (321 Ha).

Luas areal persawahan tersebut sangat membutuhkan keberadaan sarana irigasi yang memadai, dan saat ini sedang dibangun saluran irigasi dari Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman ke Kota Pariaman. Berikut dapat dilihat data luas sawah menurut jenis pengairan dan luas irigasi yang sangat membutuhkan penanganan secara serius.

**Tabel 3.3. Luas Areal Sawah Menurut Jenis Pengairan**

No	Kecamatan	Irigasi (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Pariaman Utara	467	-	467
2	Pariaman Tengah	321	-	321
3	Pariaman Selatan	165	395	560
4	Pariaman Timur	437	-	437
	<b>Jumlah</b>	<b>1.390</b>	<b>395</b>	<b>1.785</b>

### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pembangunan perikanan juga turut memperhatikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan masa yang akan datang. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauhmana KRP yang akan diterbitkan berpotensi :

- Meningkatkan risiko perubahan iklim;
- Meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- Meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;
- Menurunkan mutu dan kelimpahan sumberdaya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;
- Mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis;

- Meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan hasil indentifikasi permasalahan dan telaahan visi dan misi serta sasaran jangka menengah renstra kementerian dan propinsi, maka ditentukan isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan sektor pertanian, pangan dan perikanan di Kota Pariaman. Maka dirumuskan rencana strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang terintegrasi antara keahlian sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA) dan teknologi agar mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategik, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana strategik Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Dari analisis ini Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat mengidentifikasi kekuatan (strenght), kelemahan (Weakness), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (Threat) yang ada. Atas dasar itu, strategi pencapaian Visi dan Misi organisasi dapat diformulasikan. Analisis lingkungan dilakukan baik terhadap lingkungan internal maupun terhadap lingkungan eksternal. Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Sementara itu, analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Secara singkat, hasil analisis lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat dijabarkan sebagai berikut

### **Analisis lingkungan internal**

Analisis SWOT ;

Kekuatan/ Strenght :

- a. Dukungan sarana dan prasarana,
- b. Hubungan baik aparat dengan pelaku pertanian dan perikanan,
- c. Kerjasama dan dukungan dari instansi vertikal yang terlaksana dengan baik.

Kelemahan :

- a. Terbatasnya SDM aparatur
- b. Suasana dan lingkungan kerja kurang dinamis
- c. Lemahnya budaya dan etos kerja;

**Analisis lingkungan Eksternal**

Peluang / Opportunities:

- a. Masih tersedianya lahan pertanian dan perikanan;
- b. Banyaknya masyarakat yang berusaha di bidang pertanian dan perikanan;
- c. Tersedianya akses pasar;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian dan perikanan;
- e. Adanya komoditi unggulan daerah;
- f. Berkembangnya IPTEK di bidang pertanian dan perikanan;
- g. Sektor Pertanian dan perikanan masih merupakan sektor unggulan
- h. Adanya Program Ketahanan Pangan;
- i. Produksi induk dan benih ikan unggul yang berkualitas;
- j. Diversifikasi hasil olahan produk perikanan.

Ancaman/ Threat :

- a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan potensi budidaya perikanan menjadi pemukiman dan kawasan perdagangan dan perkantoran
- b. Keterbatasan sarana produksi pertanian dan perikanan
- c. Semakin meningkatnya harga saprodi dan saprokan;
- d. Faktor iklim;
- e. Rendahnya motivasi petani untuk penerapan teknologi baru;

- f. Kurangnya keaktifan kelembagaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan;
- g. Degradasi ekosistem laut dan pesisir (terumbu karang, mangrove);
- h. Serangan hama dan penyakit ikan.

<b>Kekuatan dan peluang</b>	<b>Kekuatan:</b> a. Dukungan sarana dan prasarana b. Hubungan harmonis dengan pelaku pertanian dan perikanan c. Anggaran tersedia d. Kerjasama dan dukungan dari instansi vertikal yang terlaksana dengan baik	<b>Peluang:</b> 1. Dukungan sarana dan prasarana 2. Hubungan harmonis dengan pelaku pertanian dan perikanan 3. Anggaran tersedia 4. Kerjasama dan dukungan dari instansi vertikal yang terlaksana dengan baik
<b>Kelemahan dan Ancaman</b>	<b>Kelemahan :</b> a. Terbatasnya SDM aparatur b. Suasana dan lingkungan kerja kurang dinamis c. Lemahnya budaya dan etos kerja	1. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM dan Aparatur 2. Mewujudkan pembinaan dan penyuluhan bagi pelaku pertanian dan perikanan 3. Mewujudkan budaya dan etos kerja yang baik
		1. Meningkatkan pemanfaatan potensisumberdaya manusia dan sumberdaya alam pertanian dan perikanan 2. Mengembangkan pemasaran dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan 3. Mewujudkan pembangunan dan rehab sarana dan prasarana pendukung pertanian dan perikanan 4. Mengembangkan komoditi unggulan daerah 5. Mengembangkan budaya dan etos kerja untuk penerapan teknologi baru

<p><b>Ancaman:</b></p> <p>a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan potensi budidaya perikanan menjadi pemukiman dan kawasan perdagangan</p> <p>b. Degradasi ekosistem laut dan pesisir (terumbu karang, mangrove).</p> <p>c. Keterbatasan sarana produksi pertanian, pakan ternak dan ikan</p> <p>d. Semakin meningkatnya harga saprodidan saprokan</p> <p>e. Faktor iklim</p> <p>f. Rendahnya minat petani, nelayan dan pembudidaya ikan untuk penerapan teknologi baru</p> <p>g. Kurangnya partisipasi kelembagaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan</p> <p>h. Serangan penyakit hewan ternak serta hama dan penyakit ikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi terjadinya alih fungsi lahan</li> <li>2. Pengaturan pola tanam berdasarkan kondisi iklim</li> <li>3. Membina kelompok pengawas perikanan (pokmaswas)</li> <li>4. Membina petani untuk melakukan tumpang sari padi ikan (mina padi)</li> <li>5. Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan</li> <li>6. Penyebaran informasi baru IPTEK pertanian dan perikanan kepada petani, nelayan dan pembudidaya ikan</li> <li>7. Membentuk kawasan sentra produksi pertanian dan perikanan</li> <li>8. Mencegah dan mengurangi terjangkitnya penyakit ternak serta hama dan penyakit ikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan penerapan teknologi pertanian dan perikanan</li> <li>2. Pengembangan budidaya laut dan pesisir</li> <li>3. Produksi induk dan benih ikan yang berkualitas</li> <li>4. Mewujudkan pembinaan dan pelatihan generasi muda yang ingin berusaha di bidang pertanian dan perikanan</li> <li>5. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui pengolahan dan pemasaran hasil</li> <li>6. Diversifikasi hasil olahan produk perikanan.</li> <li>7. Peningkatan populasi hewan ternak</li> </ol>
--	---	--

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN**

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT**

##### **DAERAH**

Tujuan merupakan hasil yang bersifat kuantitatif dan merupakan ukuran pencapaian keberhasilan kinerja perangkat daerah. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Visi daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 adalah *Pariaman Kota Wisata, perdagangan, jasa yang religious dan berbudaya*. Untuk mencapai visi tersebut maka yang akan dijadikan tujuan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dalam jangka waktu 2019-2023 adalah :

***“Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap  
Perekonomian”***

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program-program pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Tujuan dapat dianggap tercapai apabila sasaran bisa dipenuhi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2018-2023 maka dirumuskan tujuan dan sasaran tersebut seperti diuraikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi kinerja awal RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran tahun ke				
						2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan Terhadap PDRB	Income perkapita petani dan nelayan.			%	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
		1. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan dan Pertenakan	Jumlah Produksi Pertanian	ton	38.850	20.292	20.692	21.105	21.527	21.957
			Jumlah Produksi Perikanan	ton	6.327	6.588	6.615	6.638	6.660	6.728
			Jumlah Populasi Ternak	ekor	2.327	2.358	2.393	2.429	2.466	2.503
			Jumlah Produksi Peternakan	ton	651.454	661.236	671.154	681.222	691.440	701.812
		2. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan : - PPH % Tk. Konsumsi Pangan (Skor PPH)	%	86	86	87	88	89	90

Tabel 4.2. Revisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode (2018)	Capaian		Target Awal			Target Perubahan			Kinerja Akhir Periode	Ket
						2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Pesentase Sektor Pertanian Terhadap PDRB			%	18.66	18.27	18.37	18.47	18.57	18.67	18.47	18.57	18.67	18.67	
Terhadap Perekonomian		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indek Ketahanan Pangan	Nilai	64.77	71.04	72.87				73.37	78.00	81.00	81.00	
		Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian	% Capaian Produksi Sektor Pertanian	%	95.00	99.00	98.00				98.00	98.00	98.00	98.00	

**BAB V****STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman, ditempuh dengan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan OPD Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman

Misi 2 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berbudaya				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian	1. Meningkatnya Ketahanan Pangan	1.Peningkatan Konsumsi Pangan	1.Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan
			2.Peningkatan ketersediaan, distribusi , akses dan keberagaman pangan	1.Meningkatkan ketersediaan, distribusi, akses dan keberagaman pangan 2. meningkatkan cadangan pangan 3. Meningkatkan penerapan polapangan B2SA
			3. Peningkatan Pengawasan Harga Pangan	1.Meningkatkan pemantauan harga pangan
			4. Peningkatan mutudan Keamanan Pangan	1. Meningkatkan penyuluhan dan pemeriksaan mutu dan keamanan pangan

Misi 5 : Memperkuat ekonomi kerakyatan/ekonomi kreatif yang berbasis local dan budaya masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahkebijakan
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian	2. Peningkatkan Produksi Sektor Pertanian  a. Pertanian	1. Peningkatan penerapan teknologi pertanian.	1. Memfasilitasi penyediaan teknologi budidaya pertanian
				2. Memfasilitasi penyediaan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan komoditas pertanian
			2. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Pertanian	1. Memfasilitasi pembangunan sarana jaringan irigasi tersier
				2. Memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani
			3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di sector pertanian	3. Meningkatkan pemanfaatan luas lahan yang terlantar untuk pertanian
				1. Memfasilitasi pelatihan, kursus dan penyuluhan pertanian
		b. Perikanan	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat perikanan	1. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi anggota (individu) dan kelompok usaha pembudidaya ikan
				2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat perikanan dalam pengawasan dan pengelolaan sumberdaya ikan
				3. Meningkatkan keterampilan nelayan melalui program dan kegiatan peningkatan SDM
			2. Memanfaatkan kondisi geografis, daya dukung lahan dan sumberdaya alam yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan	1. Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana penangkapan ikan
	2. Pengembangan kawasan perikanan budidaya ikan			
	3. Pengembangan teknologi pengolahan pakan local alternatif			
	4. Pengembangan dan Optimalisasi Produksi			

			Induk dan Benih Ikan
		3.Meningkat-kan konsumsi ikan	1. Promosi gerakan mengkonsumsi ikan
		4.Mendorong terbentuk-nya sentra-sentra industry pengolahan hasil perikanan yang ramah lingkungan	1. Pembinaan unit usaha swadaya milik masyarakat yang berusaha di sektor perikanan 2. Pengembangan manajemen/ pengelolaan usaha perikanan yang sebagian masih bersifat tradisional 3. Peningkatan kerja sama dalam mengakses permodalan
	c. Peternakan	1.Peningkatan penerapan teknologi peternakan	1. Meningkatkan teknologi produksi peternakan 2.Meningkatkan teknologi pengolahan hasil peternakan 3. Meningkatkan kankualitas pakan ternak 4. Penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMSZ)
		2. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Peternakan	1.Menyediakan sarana pendukung produksi peternakan 2.Meningkatkan Pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan
		3.Peningkatankua litas sumberdayama nusia di sector peternakan	1. Meningkatkan pengawasan terhadap Bahan Pangan Asal Hewan (ASUH) 2. Meningkatkan wawasan pelaku usaha dan Pembina peternakan 3. Meningkatkan motivasi pelaku usaha peternakan
		4. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	1. Meningkatkan kualitas SDM kesehatan hewan dan masyarakat veteriner 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan keswan dan kesmavet

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman disusun berdasarkan rancangan program dan kegiatan yang tertuang pada rancangan akhir RPJMD Kota Pariaman tahun 2019 – 2023, dengan uraian sebagaimama berikut :

#### **A. Program Strategis**

Rencana program strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman terdiri dari, yaitu :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
4. Program pengembangan budidaya perikanan
5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
6. Program pengembangan perikanan tangkap
7. Program peningkatan produksi hasil peternakan
8. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
9. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
10. Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Pertanian/ Peternakan

#### **B. PROGRAM PENUNJANG**

Rencana program penunjang program – program strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman terdiri dari, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program pengembangan data/informasi / statistic daerah

Penjabaran pelaksanaan program pada OPD Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman melalui berbagai kegiatan strategis dan kegiatan penunjang, yaitu :

#### **A. KEGIATAN STRATEGIS**

##### **I. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**

1. Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan
2. Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
3. Kegiatan Pemantauan dan analisis harga dan distribusi pangan
4. Kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah
5. Kegiatan Pendampingan desa mandiri pangan dan agrowisata
6. Kegiatan Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
7. Kegiatan Pengembangan diversifikasi tanaman
8. Kegiatan Pengembangan perbenihan/perbibitan
9. Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan
10. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha pangan masyarakat / toko tani Indonesia

11. Kegiatan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian / perkebunan
12. Kegiatan Penyuluhan sumber pangan alternatif
13. Kegiatan Operasional Penunjang Dewan Ketahanan Pangan
14. Kegiatan Sistem Pelaporan Katahanan Pangan
15. Kegiatan Pendampingan Upsus Peningkatan Produksi Padi Menuju Swasembada Pangan
16. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Tanaman Hortikultura
17. Kegiatan Penyusunan dan Analisa Ketersediaan Pangan (SKPG, FSVA, NBM)
18. Kegiatan Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/ perkebunan yang dipasarkan
19. Kegiatan Pemantauan Produksidan Ketersediaan Pangan
20. Kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (Musrenbangtan).

## **II. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan**

1. Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

## **III. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**

1. Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian
2. Kegiatan Pengembangan bibit unggul perkebunan
3. Kegiatan Pembangunan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian (DAK)

4. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian.

#### **IV. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

1. Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul
2. Kegiatan Kesehatan ikan dan lingkungan
3. Kegiatan Penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)
4. Kegiatan Budidaya Ikan Keramba
5. Kegiatan Pendampingan Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri)
6. Kegiatan Sarana dan Prasarana BBI serta percontohan budidaya air tawar (DAK)
7. Kegiatan Bantuan calon induk ikan unggul
8. Kegiatan Tabungan gurami di kolam pekarangan (TAGURI)
9. Kegiatan Budidaya lele bioflock
10. Kegiatan Mina Padi
11. Kegiatan Bantuan sapsras perikanan budidaya
12. Kegiatan Pendederan gurami skala rumah tangga
13. Kegiatan Pengembangan pakan alami
14. Kegiatan Asuransi pembudidaya ikan (KUSUKA)
15. Kegiatan Temu pelaku usaha perikanan budidaya
16. Kegiatan Peningkatan SDM pembudidaya dan pembenihan ikan
17. Kegiatan Mina ponik/aquaponik
18. Kegiatan Pengembangan budidaya laut.

## **V. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**

1. Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2. Kegiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
3. Kegiatan Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)
4. Kegiatan Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan ternak menjelang HBKN
5. Kegiatan Sosialisasi penanggulangan penyakit rabies
6. Kegiatan Penguatan sistem informasi dan pelaporan kesehatan hewan.

## **VI. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

1. Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
2. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
3. Kegiatan Monitoring sumberdaya ikan
4. Kegiatan Penyediaan alat tangkap nelayan
5. Kegiatan Penguatan kelembagaan perikanan tangkap
6. Kegiatan Pelatihan penangkapan ikan
7. Kegiatan Pembinaan Pokmaswas
8. Kegiatan Restocking perairan umum
9. Kegiatan Asuransi kecelakaan diri nelayan.

## **VII. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**

1. Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2. Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan
3. Kegiatan Pengembangan hijauan makanan ternak
4. Kegiatan Pendampingan UPSUS SIWAB

**VIII. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**

1. Kegiatan Peningkatan konsumsi ikan melalui program Gemar Ikan
2. Kegiatan Pelatihan penerapan manajemen mutu terpadu
3. Kegiatan Pendampingan kegiatan Forikan
4. Kegiatan Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran
6. Kegiatan Kontes ikan hias
7. Kegiatan Peningkatan produksi ikan non konsumsi.

**IX. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**

1. Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
2. Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan produk asal hewan
3. Kegiatan Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan
4. Kegiatan Operasional rumah potong hewan (RPH).

**X. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Peternakan**

1. Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak
2. Kegiatan Peningkatan kapasitas alat dan mesin pertanian
3. Kegiatan Pengelolaan kebutuhan pupuk dan pestisida
4. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi JITUT
5. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi JUT

6. Kegiatan Rehab sedang gedung RPH
7. Kegiatan Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian/perkebunan
8. Kegiatan Media, data dan informasi penyuluhan
9. Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani.

## **B. KEGIATAN PENUNJANG**

### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya aAir dan listrik
3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor (ATK)
7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
10. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran

### **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

6. Kegiatan Pembuatan jembatan penyeberangan (+biaya perencanaan pengawasan )
7. Kegiatan Pembuatan pagar kantor
8. Kegiatan Pemasangan paving block
9. Kegiatan Pembuatan gudang logistic peralatan (+biaya perencanaan dan pengawasan )
10. Kegiatan Pengadaan mebeleur

### **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

### **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan aparatur
2. Kegiatan Peningkatannkapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan
3. Keegiatat Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh perikanan.

### **V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

### **VI. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah**

1. Kegiatan Pengolahan updating dan analisisdata dan statistik daerah.

Uraian target program dan kegiatan serta pendanaan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman selengkapnya disajikan pada Tabel 6.1.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN**

Indikator kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi merupakan indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pariaman 2019 – 2023. Indikator kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman yang mengacu pada RPJMD Kota Pariaman Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman yang mengacu pada RPJMD Kota Pariaman Tahun 2019 – 2023

REVISI INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018-2023						
DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN						
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	8
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indek Ketahanan Pangan	Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan disuatu wilayah	$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ Dimana: $i$ : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 $j$ : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 $Y_j$ : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j $a_i$ : Bobot masing-masing indikator ke-i $X_{ij}$ : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j	Kementan RI	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
2	Meningkatnya Produksi Sektor	% Capaian Produksi Sektor Pertanian	Persentase capaian produksi sektor pertanian dari target yang sudah ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Pertanian}}{\text{Target Produksi Pertanian}} \times 100\%$	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

TABEL 7.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI PERURUSAN DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN

a) Pangan								
No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Realisasi		Target		
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal 4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 6. Tertanganinya kerawanan pangan 7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan 8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100\%$	175%	271%	250%	250%	250%
b) Pertanian								
No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Realisasi		Target		
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per luas panen}}{\text{luas panen}} \times 100\%$	0.12%	0.13%	0.13%	0.14%	0.15%
b.2) Peternakan								
No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Realisasi		Target		
				2019	2020	2021	2022	2023
2.	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	0%	0%	-20%	-20%	-20%
c) Kelautan dan Perikanan								
No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Realisasi		Target		
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi 2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional 3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang 4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan 5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) dalam ton	6324.81	6526.42	6638	6660	6728

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

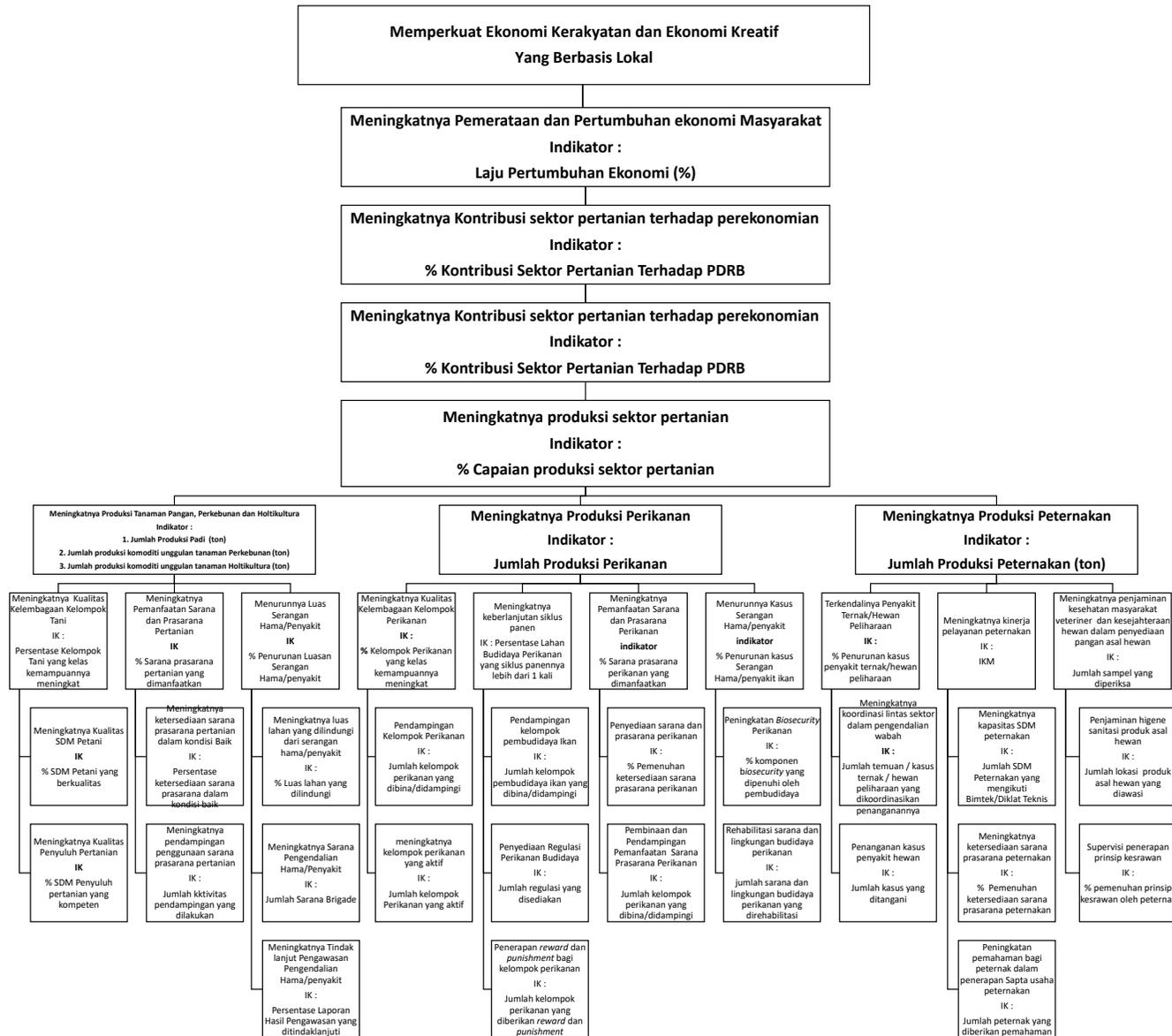
Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman 2019-2023 sangat ditentukan oleh komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder, juga oleh karena terjalinnya kerja sama seluruh pihak terkait dan adanya peran serta atau partisipasi aktif seluruh masyarakat perikanan dan kelautan, termasuk aparatur pelaksana pembangunan, baik di tingkat terendah desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Oleh karena itu Renstra ini pada hakekatnya bukan hanya milik dinas saja, tapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pembangunan daerah dan nasional, rencana pembangunan dari seluruh program Pemerintah Kota Pariaman yang secara keseluruhan yang dimiliki, dilaksanakan dan dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman dalam rangka pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya Renstra ini bersifat akomodatif atas kondisi faktual yang berkembang di masyarakat, dengan kata lain jika keadaan/kondisi faktual masyarakat yang berkembang mengharuskan adanya penyesuaian, perubahan atau revisi, maka hal itu dapat dilakukan selama didasarkan pada prioritas dan urgensi pembangunan. Pada akhirnya, dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan bersama dan

dapat dilaksanakan sesuai rencana, dimana menjadi telah sebuah komitmen bersama bahwa **"sebaik-baiknya perencanaan adalah dapat terlaksana sesuai perencanaan itu sendiri"** dan kontradiktifnya menjadi pertimbangan untuk selalu menuju kesempurnaan, Karena pada hakikatnya **"tidak ada perencanaan (manusia) yang sempurna, kecuali rencana-Nya"**.

# **LAMPIRAN**

# POHON KINERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN



Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman

**DASRIL, S.Sos.**  
NIP. 1961219 199303 1 002

# POHON KINERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berbudaya

Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat  
Indikator:  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurunnya prevalensi stunting  
Indikator:  
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Meningkatnya Ketahanan Pangan  
indikator:  
Indeks Ketahanan Pangan

Meningkatnya Ketersediaan Pangan (Gabah dan Beras)  
indikator:  
Jumlah Stok Pangan yang tersedia

Meningkatnya keterjangkauan dan stabilitas harga pangan pokok  
Indikator:  
% peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan

Meningkatnya Kemanfaatan Pangan  
indikator:  
1. % AKE (Angka Kecukupan Energi)  
2. Skor PPH

Meningkatnya Kinerja Lumbung Pangan  
Indikator:  
% Lumbung Pangan berkinerja baik

Meningkatnya Cadangan Pangan  
Indikator:  
% Peningkatan Cadangan Pangan

Meningkatnya peran Toko Tani Indonesia dalam stabilisasi pasokan dan harga  
Indikator:  
% bahan pangan strategis yang disediakan

Terlaksananya Operasi Pasar IK :  
jumlah operasi pasar yang dilaksanakan

Meningkatnya Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  
Indikator:  
% Peningkatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

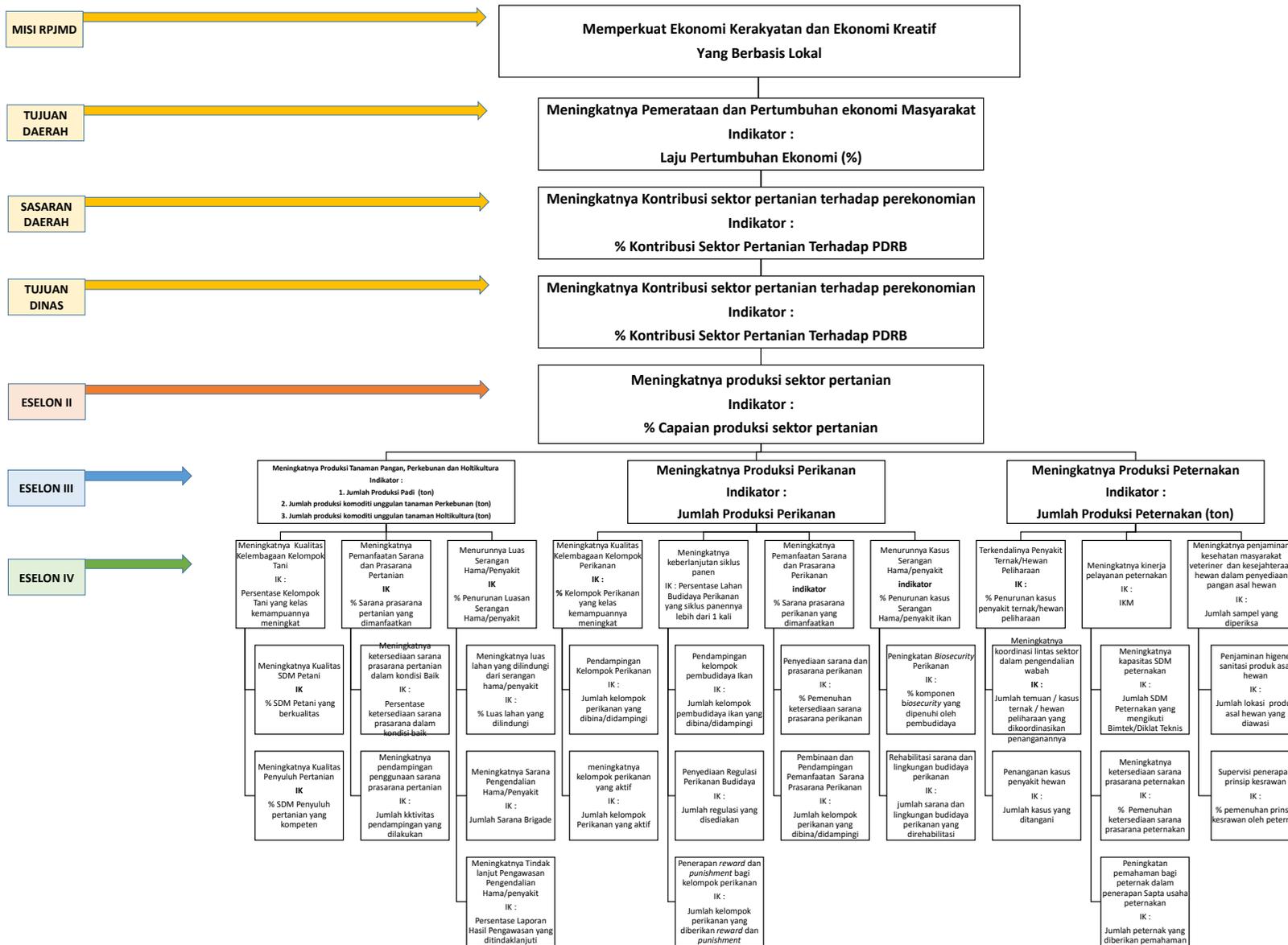
Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan  
IK :  
% RT yang menerapkan prinsip B2SA

Optimalisasi peran dan fungsi kelompok lumbung pangan  
IK :  
Jumlah kelompok lumbung pangan yang

Meningkatnya kualitas sarana prasarana dan infrastruktur pendukung kumbung pangan  
IK :  
Jumlah sarana prasarana dan infrastruktur pendukung sesuai standar

Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman  
  
DASRIL, S.Sos.  
NIP. 1961219 199303 1 002

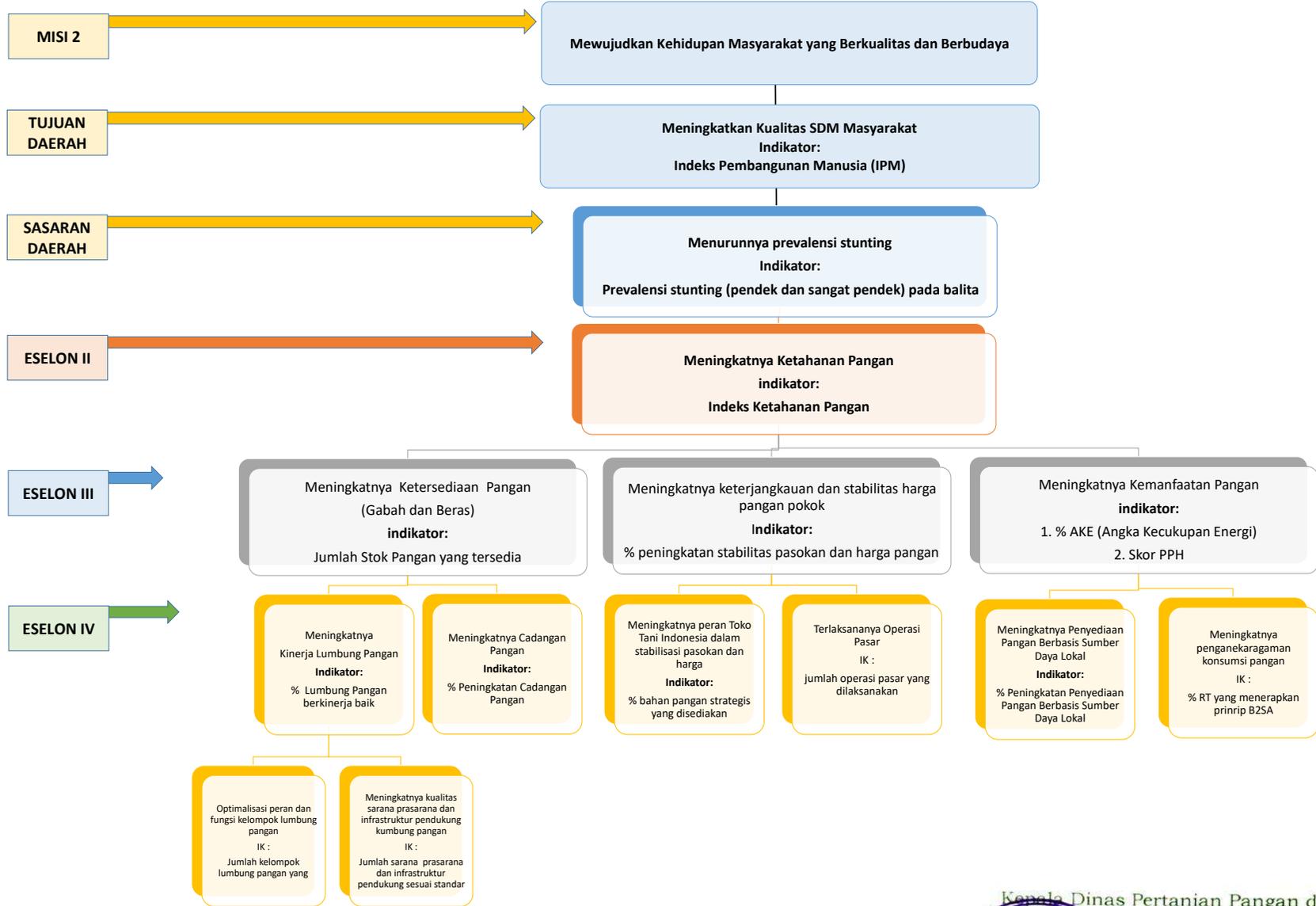
# CASCADING DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN



Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman

**DASRIL, S.Sos.**  
NIP. 1961219 199303 1 002

**CASCADING DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN**

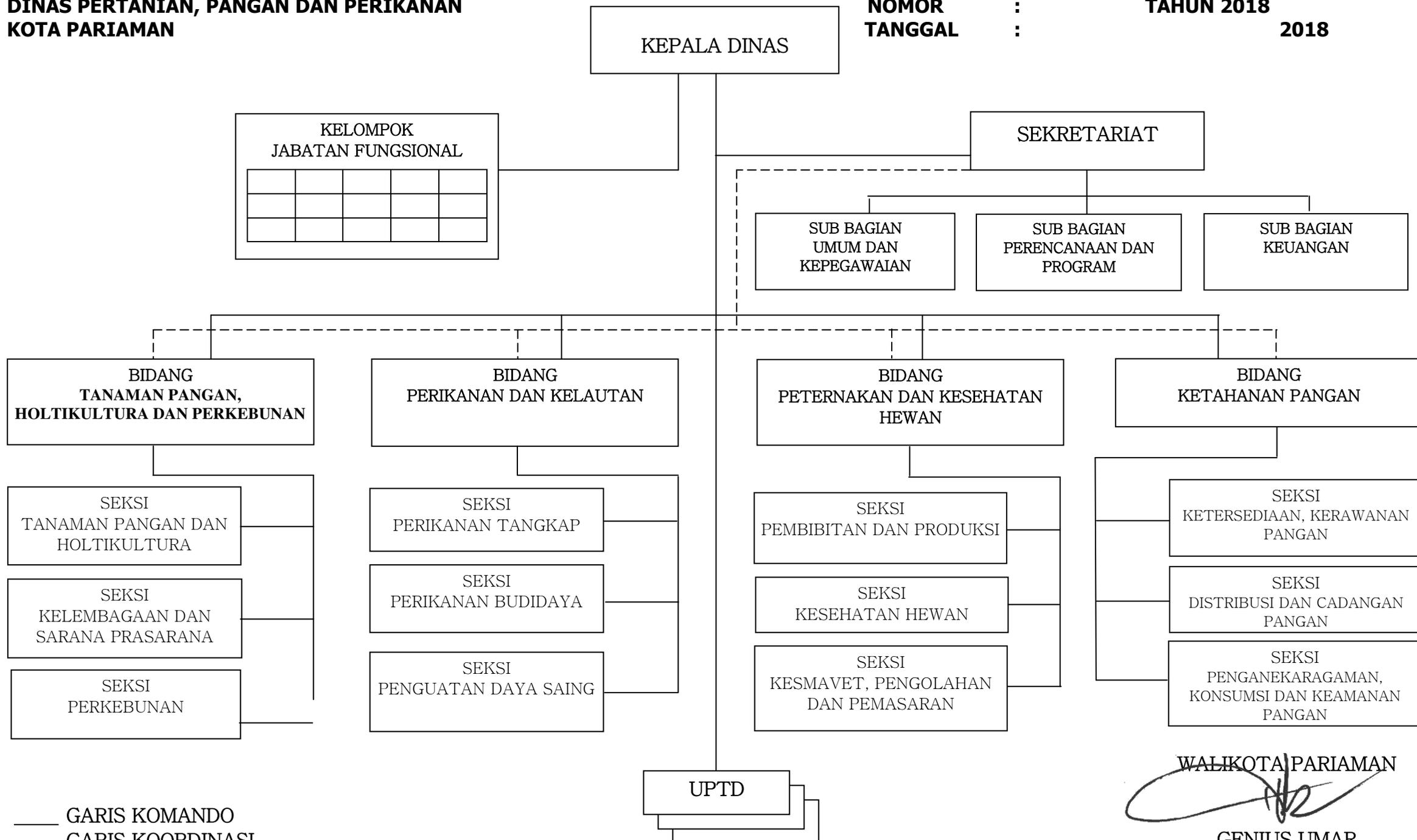


Kantor Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman

**DASRIL, S.Sos.**  
NIP. 1961219 199303 1 002

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TIPE A  
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
KOTA PARIAMAN**

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : TAHUN 2018  
TANGGAL : 2018**



\_\_\_\_ GARIS KOMANDO  
- - - - GARIS KOORDINASI

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah UPT. Balai Benih Ikan (Sumber dana APBD Kota Pariaman)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)			
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)											
Peran sektor Balai Benih Ikan dalam pembenihan, budidaya ikan dan Pembinaan Teknologi Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	Pelayanan Adm Perkantoran		I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																	
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Tersedianya Perangkat dan Materai	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	UPT. BBI	Kota Pariaman
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pembayaran jasa air dan listrik tepat waktu	1 tahun	23.790.000	1 tahun	28.400.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	30.000.000	UPT. BBI	Kota Pariaman						
				3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1. Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	3 unit	2.320.000	3 unit	2.320.000	3 unit	2.500.000	3 unit	2.500.000	UPT. BBI	Kota Pariaman						
				4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Terlaksananya administrasi keuangan sebagaimana mestinya	1 tahun	21.600.000	12 bulan	21.600.000	12 bulan	23.000.000	12 bulan	23.000.000	UPT. BBI	Kota Pariaman						
				5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Tersedianya Alat dan bahan Kebersihan	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	1 tahun	700.000	1 tahun	700.000	UPT. BBI	Kota Pariaman						
				6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	2.500.000	1 tahun	2.549.000	12 bulan	3.000.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	3.000.000	UPT. BBI	Kota Pariaman
				7. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.000.000	1 tahun	2.500.000	1 tahun	2.500.000	UPT. BBI	Kota Pariaman						
				8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1. Tersedianya komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	1 tahun	520.000	1 tahun	520.000	1 tahun	600.000	1 tahun	600.000	UPT. BBI	Kota Pariaman						
				9. Penyediaan Makanan dan Minuman	1. Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 tahun	2.960.000	1 tahun	3.330.000	1 Tahun	3.520.000	1 Tahun	3.520.000	UPT. BBI	Kota Pariaman						
				10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1. Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	32.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	60.000.000	UPT. BBI	Kota Pariaman								
	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>		II.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																	
				1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 buah	20.000.000			1 tahun	20.000.000							UPT. BBI	Kota Pariaman		
				2. Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	25.980.000	1 tahun	26.688.000	1 tahun	30.000.000	UPT. BBI	Kota Pariaman								
				3. Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1. Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 tahun	1.500.000	1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000	UPT. BBI	Kota Pariaman								

Peningkatan Produksi Pembenihan dan pembudidayaan ikan	1	Produksi Benih Ikan Lele, Gurami dan ikan nila	III.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan																UPT. BBI	Kota Pariaman	
				1.	Operasional Pembenihan BBI	1.	Tersedianya operasional Pembenihan BBI		1 tahun	114.600.000	1	293.900.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1			300.000.000
				2.	Perbanyak Induk Ikan Lele	1.	Tersedianya calon induk ikan lele		3 ton	106.785.000	3 ton	152.908.400	3 ton	165.000.000	3 ton	165.000.000	3 ton	165.000.000	3 ton			
				3.	Perbanyak induk gurami	1	Tersedianya calon induk ikan gurami						400 kg	60.000.000	400 kg	60.000.000						
				4	Perbanyak induk Nila	1	Tersedianya calon induk ikan nila							6 paket	65.000.000	6 paket	65.000.000					
				5	perbanyak induk ikan mas	1	Tersedianya calon induk ikan mas															
	2	Produksi budidaya ikan gurami, lele dan ikan nila	6	pembangunan saluran sumber air sistem paralon	1	tersedianya saluran utama sumber air BBI					1 tahun	945.000.000										
					2	terpenuhinya debit air BBI																
Peningkatan Pembinaan Teknologi Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	2	Produksi budidaya ikan gurami, lele dan ikan nila	7	Budidaya Ikan Gurami	1.	Terlaksananya budidaya ikan gurami			2 ton	22.000.000			2	22.000.000			2	22.000.000	UPT. BBI	Kota Pariaman		
				8	Budidaya ikan lele	1.	Terlaksananya budidaya ikan lele					5 Ton	100.000.000	UPT. BBI	Kota Pariaman							

Kepala Dinas Pertanian Pangan dan  
Perikanan Kota Pariaman



DASRIL, S.Sos.  
NIP. 1961219 199303 1 002

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah UPT. Balai Penyuluh Pertanian  
(Sumber dana APBD Kota Pariaman)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (000)
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)		
Peran Sektor Pertanian dan Perikanan dalam mewujudkan ketahanan pangan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat	1. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan, Perikanan dan Peternakan  2. Ketahanan Pangan	1. Produksi Hasil Pertanian (Padi) 2. Produksi Hasil Perikanan 3. Jumlah Populasi Ternak (Sapi) 4. Jumlah Produksi 5. Persentase Tingkat Komsumsi Pangan (Skor PPH)	I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>														
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Penyediaan Materai	Belum ada	12 bulan	498	12 bulan	498	12 bulan	498	12 bulan	498	12 bulan	498		
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah telepon dan listrik yang dibayar tepat waktu	Belum ada	12 bulan	30.000	12 bulan	40.000	12 bulan	45.000	12 bulan	50.000	12 bulan	55.000		
				3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Terbayarnya honor rarium pengelola keuangan	Belum ada	12 bulan	22.200	12 bulan	22.200	12 bulan	22.200	12 bulan	22.200	12 bulan	22.200		
				4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Tersedianya Alat dan bahan untuk Kebersihan Kantor 2. Tersedianya Tenaga Kebersihan	Belum ada	12 bulan	62.797	12 bulan	70.653	12 bulan	75.660	12 bulan	80.000	12 bulan	85.000		
				5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Belum ada	12 bulan	10.000	12 bulan	10.000	12 bulan	10.500	12 bulan	11.000	12 bulan	11.500		
				6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	1. Jumlah barang cetakan dan penggunaan yang dibeli	Belum ada	12 bulan	6.000	12 bulan	8.000	12 bulan	8.200	12 bulan	8.400	12 bulan	8.600		
				7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1. Tersedianya komponen Listrik	Belum ada	12 bulan	2.002	12 bulan	2.492	12 bulan	2.500	12 bulan	2.600	12 bulan	2.700		
				8. peyediaan peralatan rumah tangga	1. Jumlah peralatan rumah tangga yang di sediakan	Belum ada	1 Tahun	4.000	1 Tahun	7.500	1 Tahun	7.700	1 Tahun	8.000	1 Tahun	8.250		
				9. Penyediaan Makanan dan Minuman	1. Jumlah peserta rapat yang dapat makan minum	Belum ada	1 Tahun	6.480	1 Tahun	9.600	1 Tahun	9.800	1 Tahun	10.000	1 Tahun	10.200		
				10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan/diikuti	Belum ada	12 bulan	165.000	12 bulan	190.000	12 bulan	200.000	12 bulan	210.000	12 bulan	220.000		
			II.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>														
				1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1. Jumlah pengadaan AC 2. Plang Merk Kantor 3. Pembelian Laptop	3 1 4			2 Unit 4 Unit 1	15.000 10.000 12.000	1 Unit Unit 1	8.000 Unit 8.250	1 Unit Unit 1	8.500 Unit 14.000				

					4. Pembelian Printer	4			Unit 2	6.000	2	6.500	2	7.000	Unit 2	7.500		
					5. Pembelian Kursi Tamu	3			Unit 1 Set	10.000	1 Set	10.500	1 Set	11.025	Unit 1 Set	11.575		
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1. Jumlah Gedung yang diperbaiki	4 unit	1 tahun	8.000	1 tahun	15.000	1 tahun	16.000	1 tahun	17.000	1 tahun	18.000		
				3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	1. Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	3 unit roda 3, 24 unit roda 2		68.600	3 unit roda 3, 24 unit roda 2	87.720	3 unit roda 3, 24 unit roda 2	92.100	3 unit roda 3, 24 unit roda 2	96.700	3 unit roda 3, 24 unit roda 2	102.500		
				4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1. Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki	Belum memadai	1 tahun	16.000	1 tahun	18.000	1 tahun	19.000	1 tahun	20.000	1 tahun	21.000		
			III.	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>														
				1. Pendidikan dan pelatihan formal	1. Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	Belum ada	1 Tahun	5.000	1 Tahun	5.000	1 Tahun	5.000	1 Tahun	5.000	1 Tahun	5.000		
			IV.	<b>peningkatan kesejahteraan petani</b>														
				1. penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	1. jumlah pendampingan dan pembinaan petani yang disediakan	sudah ada	1 Tahun	379.866	1 Tahun	411.536	1 Tahun	432.110	1 Tahun	453.700	1 Tahun	476.385		
			V.	<b>peningkatan ketahanan pangan</b>														
				1. pengembangan perbenihan /perbibitan	1. Terlaksananya Demplot, Pelatihan dan Pengadaan Pestisida	sudah ada	1 Tahun	240.086	1 Tahun	303.900	1 Tahun	308.900	1 Tahun	313.900	1 Tahun	318.900		
				2. peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian	1. Terlaksananya Kaji Terap	sudah ada	1 Tahun	252.670	1 Tahun	197.116	1 Tahun	206.972	1 Tahun	217.320	1 Tahun	228.186		
			VI.	<b>pengembangan ternak unggas</b>														
				1. budidaya ternak unggas	1. Meningkatnya Produksi, Produktivitas budidaya ternak unggas	sudah ada	1 Tahun	154.660	1 Tahun	175.675	1 Tahun	180.675	1 Tahun	185.675	1 Tahun	190.675		
Jumlah										1.627.890		1.667.815		1.738.268		1.826.169		



Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	KondisiK inerja diawal Renstra (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir Renstra (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)		
								Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)										
Persentase Kontribusi sektor pertanian, perikanan dan Peternakan terhadap PDRB	1. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Peningkatan Kontribusi Pertanian	I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatnya Administrasi Perkantoran</b>	Persentase terlayannya administrasi perkantoran	100%	100%	1.274.700	100%	693.200	100%	775.100	100%	785.600	100%	816.600	100%	4.345.200	Sekretaris	
				1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1. Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diayani	1.900 surat	2.000 surat	3.000	2.000 surat	3.000	2.000 surat	2.500	2.000 surat	2.500	2.000 surat	3.000	10.000 surat	14.000	Sekretaris	
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1. Masa penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	80.000	12 bulan	115.000	12 bulan	115.000	12 bulan	117.000	12 bulan	120.000	60 bulan	547.000	Sekretaris	
				3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional		1. Kendaraan Roda 4 2. Kendaraan Roda 2 3. Kendaraan Roda 3 4. Cetak STNK, Plat Nopol 5. Cek Fisik kendaraan	3 unit 31 unit 4 unit 1 Tahun 1 Tahun	3 unit 31 unit 4 unit 1 Tahun 1 Tahun	25.000 77 unit 4 unit 1 Tahun 1 Tahun	4 unit 77 unit 4 unit 1 Tahun 1 Tahun	25.000 77 unit 4 unit 1 Tahun 1 Tahun	4 unit 77 unit 4 unit 1 Tahun 1 Tahun	30.000 77 unit 4 unit 1 Tahun 1 Tahun	4 unit 77 unit 4 unit 1 Tahun 1 Tahun	35.000 77 unit 4 unit 1 Tahun 1 Tahun	4 unit 77 unit 4 unit 1 Tahun 1 Tahun	40.000 77 unit 20 unit 1 Tahun 1 Tahun	20 unit 349 unit 20 unit 1 Tahun 1 Tahun	155.000	Sekretaris	
				4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		1. Jumlah bulan honor jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	230.700	12 bulan	230.700	12 bulan	250.000	12 bulan	250.000	12 bulan	250.000	60 bulan	1.211.400	Sekretaris	
				5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		1. Jumlah bulan penyediaan Alat Kebersihan Kantor dan bahan pembersih serta honor tenaga kebersihan	12 bulan 3.285 OH	12 bulan 3.285 OH	6.000 131.400	12 bulan 3.285 OH	7.500 131.400	12 bulan 3.950 OH	171.000 3.950 OH	12 bulan 3.950 OH	173.500 3.950 OH	12 bulan 3.950 OH	179.000 3.950 OH	60 bulan 19.750 OH	537.000	Sekretaris	
				6. Penyediaan Alat Tulis Kantor		1. Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan	12 bulan	40.000	12 bulan	45.000	60 bulan	205.000	Sekretaris							
				7. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan		1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	20.000	12 bulan	25.000	60 bulan	105.000	Sekretaris							
				8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		1. Jumlah komponen listrik yang disediakan	10 jenis	10 jenis	3.000	10 jenis	5.000	10 jenis	6.000	10 jenis	7.000	10 jenis	9.000	50 jenis	30.000	Sekretaris	
				9. Penyediaan Makanan dan Minuman		1. Jumlah orang per kegiatan yang disediakan makan minum rapat	625 ok	625 ok	20.000	625 ok	20.000	625 ok	25.000	625 ok	25.000	625 ok	30.000	3125 ok	120.000	Sekretaris	
				10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1. Jumlah bulan penyediaan dana rapat koordinasi dan konsultasi		12 bulan	700.000	12 bulan	80.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	60 bulan	1.080.000	Sekretaris	
11. Penyediaan jasa administrasi/ teknis perkantoran		1. Jumlah bulan penyediaan honor PTT		12 bulan	15.600	12 bulan	15.600	12 bulan	15.600	12 bulan	15.600	12 bulan	15.600	60 bulan	78.000	Sekretaris					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal Renstra (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja diakhir Renstra (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							2019		2020		2021		2022		2023				Tar get	Rp (000)	
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)					
			II.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase kondisi sarana dan prasarana aparatur	74%	75%	338.000	76%	733.000	77%	357.000	78%	312.000	79%	305.000	80%	2.045.000	Sekretaris	
				1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1. Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	1 unit	25.000	1 Unit	25.000	2 Unit	30.000	2 Unit	30.000	2 Unit	30.000	8 unit	140.000	Sekretaris	
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ operasional		1. Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	41 Unit	41 Unit	170.000	73 Unit	200.000	73 Unit	200.000	75 Unit	210.000	75 Unit	210.000	5 tahun	990.000	Sekretaris	
				3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		1. Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 unit	15 unit	25.000	15 unit	25.000	15 unit	30.000	15 unit	45.000	15 unit	45.000	75 unit	170.000	Sekretaris	
				4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1. Jumlah AC 2. Jumlah Proyektor 3. Jumlah camera	Belum memadai/ rusak			4 unit	100.000	1 unit	15.000		18.000			4 unit 1 unit 1 unit	133.000	Sekretaris	
				5. Pengadaan peralatan gedung kantor		1. Jumlah Mesin finger print 2. Jumlah Printer 3. Jumlah PC all in one 4. Jumlah Finger print 5. Jumlah Laptop	Belum memadai/ rusak	1 Unit 6 Unit 4 Unit 1 unit	118.000		118.000		12.000				20.000	1 Unit 15 Unit 6 Unit 1 unit 6 unit	268.000	Sekretaris	
				6. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		1. Jumlah jembatan 2. Jumlah pagar yang dibuat 3. jumlah lokasi pemasangan 4. Tersedianya gudang tempat penyimpanan barang 5. Jumlah canopy	Belum ada Rusak Rusak Jauh dari kantor belum ada			1 unit	220.000		620.000		0			1 unit 1 unit 1 unit 2 unit	840.000 220.000	Sekretaris	
				7. Pengadaan mebeleur		1. Jumlah kursi eselon II 2. Jumlah kursi eselon III 3. Jumlah kursi eselon IV 4. Kursi putar kecil 5. Filing cabinet 6. Kursi tamu ruang tunggu 7. Meja receptionos 8. Lemari Arsip 4. Jumlah Filing Kabinet	Belum memadai/ rusak			2 unit	45.000		70.000		9.000		15.000	1 unit 5 unit 20 unit 20 buah 35 buah 2 buah 1 set 1 unit	139.000	Sekretaris	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)			
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)					
					7. Meja receptionos 8. Lemari Arsip 4. Jumlah Filing Kabinet	1 unit				1 unit						1					
			III.	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Disiplinnya apatur dalam bekerja terutama pakaian	90%			91%	100.000			92%	100.000	92%	200.000	Sekretaris			
				1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		1. Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Diaadakan 2 tahun terakhir			100 stel	100.000			100 stel	100.000	200 stel	200.000	Sekretaris			
			IV.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan sumberdaya aparatur	75%	75%	20.000	76%	21.000	77%	21.000	78%	21.000	79%	21.000	104.000	Sekretaris		
				1. Pendidikan dan pelatihan formal		1. Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	2 orang	3 orang	20.000	3 orang	21.000	3 orang	21.000	3 orang	21.000	3 orang	15 tahun	104.000	Sekretaris		
				2. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan		1. Tersusunnya Programa Penyuluhan 2. Jumlah peserta PEDDA dan PENAS 3. Jumlah penyuluh yang fasilitasi 4. Terlaksananya supervisi penyuluh pertanian 5. Terlaksananya penilaian Dupak penyuluh 6. Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat 7. Jumlah Jambore diikuti	1 dok 10 org 38 orang 12 bulan 12 bulan -	1 dok 10 org 38 org 12 bulan 12 bulan 2 org 1 kali	57.920 123.360	1 dok 38 org 12 bulan 12 bulan -	1 dok 38 org 12 bulan 12 bulan 2 org 1 kali	129.528 136.000	1 dok 38 org 12 bulan 12 bulan 1 kali	1 dok 38 org 12 bulan 12 bulan 1 kali	136.000 250.000	1 dok 10 org 38 org 60 bulan 60 bulan 2 org 3 kali	5 dok 20 org 190 org 60 bulan 60 bulan 2 org 3 kali	696.808	Bidang Perkebunan		
				3. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh perikanan		1. Jumlah dokumen programa penyuluh perikanan 2. Jumlah penyuluh yang di fasilitasi sarana prasarana 3. Jumlah Demplot perikanan yang dibuat	20 eks -	20 eks -	77.040 -	20 eks 1 buah	20 eks 2 buah	205.000 -	20 eks 2 buah	20 eks 2 buah	100.000 -	20 eks 7 buah	100.000 -	100 eks 10 orang 7 buah	602.040	Bidang Perikanan	
			V.	Program Peningkatan pengembagan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai LAKIP SKPD	Nilai pelaporan masih rendah (C)	B	14.000	B	20.000	77%	20.000	78%	20.000	79%	20.000	94.000	Sekretaris SKPD		
				1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1. Jumlah dokumen laporan keuangan 2. Jumlah dokumen Lakip, LPPD SKPD dan Renja	1 dok 3 Dok	1 dok 3 Dok	14.000 -	1 dok 3 Dok	20.000 -	1 dok 3 Dok	20.000 -	1 dok 3 Dok	20.000 -	5 dok 3 Dok	94.000 -	94.000 -	Subag Program		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)			
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)					
					3. Tersedianya dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Tersedianya Renstra (2019-20123) dan tersedianya Renja OPD	3 jenis  1dok			3 jenis	3 jenis		3 jenis		3 jenis		12 jenis					
			VI.	Program pengembangan data/informasi /statistik daerah	Meningkatkan pengembangan data/informasi /statistik daerah	Peningkatan perencanaan kegiatan yang lebih baik	60%	5%	24.050	5%	134.500	5%	140.000	5%	140.000	15%	578.550	Sekretaris			
				1. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah		1. Jumlah dokumen data base dan data statistik Pertanian, Perkebunan, perikanan dan peternakan 2. Jumlah buku data base dan data statistik Pertanian, Perkebunan, perikanan dan peternakan	4 dok  50 buku		24.050	4 dok	134.500	4 dok	140.000	4 dok	140.000	16 dok 50 buku  50 buku	578.550	Sekretaris			
1. Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1. Produksi Hasil Pertanian (Padi)		VII.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	75%	75%	110.175	76%	175.975	77%	193.573	78%	212.930	79%	234.223	926.875	Bidang TPHBUN dan Peternakan		
				1. Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah		1. Jumlah pelaksanaan promosi hasil pertanian/perkebunan unggulan daerah dalam kota pariaman maupun luar kabupaten 2. Jumlah event promosi hasil pertanian/perkebunan unggulan daerah yang diikuti	7 keg  belum ada	7 keg	110.175		175.975		193.573		212.930	7 keg  28 event	926.875	Bidang TPHBUN			
			VIII.	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Meningkatkan produksi pertanian/ perkebunan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	75%	75%	2.016.898	76%	2.219.850	77%	2.415.843	78%	2.630.134	79%	2.864.491	12.147.216	Bidang TPHBUN dan Peternakan		
				1. Pengembangan bibit unggul pertanian		1. Luas area pengembangan bawang merah 2. Luas area demplot/SL cabe 3. Luas area pengembangan kebun cabe 4. Luas area pengembangan (demplot dan SL) kebun bawang merah 5. Jumlah peserta sekolah lapang	0,25 Ha  Belum ada 3 Ha  Belum ada  Belum ada	0,25 Ha  0,25 Ha 3 Ha  3 Ha	182.075	1 ha	208.950	2 Ha	219.398	2 Ha	230.367	2 Ha	241.886	7,25 ha  7,25 ha 15 Ha 8 Ha 110 org	1.082.676	Bidang TPHBUN	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)			
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)					
				2. Pengembangan bibit unggul perkebunan	1. Jumlah bibit kelapa dalam dan kelapa genjah	Belum banyak	5.000 bibit	125.900		160.900	10000 bibit	168.945	10000 bibit	177.392	10000 bibit	186.262	35.000 bibit	819.399	Bidang TPHBUN		
					2. Jumlah bibit kelapa genjah	Masih sedikit			3500 btg	160.900	7000 bibit		7000 bibit		7000 bibit		24500 bibit				
					3. Jumlah bibit tanaman pinang	Masih sedikit			1500 btg		3000 batang		3000 batang		3000 batang		10.500 batang				
					4. Luas demplot kakao sambung samping	Belum ada			1 ha		1 ha		1 ha		1 ha		4 ha				
				3. Pembangunan sarana peningkatan produksi pertanian (DAK)	1. Jumlah kelompok pembangunan irigasi air tanah dangkal	tidak ada	4 klp	1.609.423	5 klp	1.700.000	5 klp	1.870.000	5 klp	2.057.000	5 klp	2.262.700	24 klp	9.499.123	Bidang TPHBUN dan Pangan		
					2. Jumlah kelompok penerima pembangunan pintu air	4 kel	4 klp		4 klp		4 klp		4 klp		4 klp		20 klp				
					3. Dimanfaatkannya jalan usaha tani						2 klp		2 klp		2 klp						
				4. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian	1. Luas area pengembangan pisang jantan	Belum ada	3 Ha	99.500		150.000	2 Ha	157.500	2 Ha	165.375	2 Ha	173.644	9 Ha	746.019	Bidang TPHBUN		
					2. Luas area pengembangan pisang emas	Belum ada	1 Ha				2 Ha		2 Ha		2 Ha		7 Ha				
					3. Luas area perluasan kebun induk pisang	Masih lahan lama			2 ha												
					2. Luas area pemberian bantuan bibit untuk rehabilitasi tanaman pisang masyarakat	Belum ada			4 ha		10 Ha		10 Ha		15 Ha		39 Ha				
			IX.	<b>Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Pertanian/ Peternakan</b>	<b>Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian/perkebunan</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Peternakan</b>	25%	5%	2.271.225	5%	2.962.193	5%	2.586.216	5%	2.713.940	5%	3.089.775	50%	13.623.348	Bidang TPHBUN dan Pangan	
				2. Peningkatan Kapasitas Alat dan mesin Pertanian	1. Jumlah kelompok tani yang dibina	60 klp	60 klp	177.995		206.495		216.820		227.661		239.044	60 klp	1.068.014	Bidang TPHBUN		
					2. Jumlah kelompok pertemuan untuk optimalisasi pemanfaatan alsintan	60 klp	60 klp		60 klp		60 klp		60 klp		60 klp		300 klp				
					3. Jumlah peserta pelatihan analisa kebutuhan alsintan	30 orang	30 orang		50 orang		30 orang		30 orang		30 orang		150 orang				
					4. Waktu pelaksanaan operasional brigade alsintan	12 bulan	12 bulan		14 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan				
				3. Pengelolaan kebutuhan pupuk dan Pestisida	1. Jumlah kelompok tani dampingan dan penyusunan E- RDKK	100 klp	100 klp	44.810		63.110		66.266		69.579		73.058	500 klp	316.822	DBidang TPHBUN		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)				
					2. Jumlah peserta sosialisasi kartu tani	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	1.000 Orang						
					3. Waktu pelaksanaan pendampingan KP3	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60 bulan						
				4. Pembangunan/ Rehabilitasi JIUT	1. Jumlah paket JIUT yang dibangun pada keltan	10 paket	10 paket	10 paket	5 paket	1.816.975	5 paket	1.907.824	5 paket	2.003.215	35 paket	9.106.517		Bidang TPHBUN		
					2. Jumlah pakrt JIUT yag dipelihara pada keltan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket		2 paket	2 paket	2 paket	10 paket						
				5. Pembangunan/ Rehabilitasi JUT	1. Jumlah paket JUT yang dibangun pada keltan	10 paket	2 paket	135.300	2 paket	142.065	1 paket	149.168	1 paket	156.627	1 paket	164.458	7 paket	747.618	Bidang TPHBUN	
				6. Media, Data dan Informasi Penyuluhan	1. Tersusunnya Buletin Sahabat Tani	4 edisi	4 edisi	119.725	4 edisi	137.225	4 edisi	145.000	4 edisi	152.250	4 edisi	160.000	20 edisi	714.200	Bidang TPHBUN	
				7. Peningkatan kemampuan lembaga petani	1. Jumlah lembaga petani yang dibina	8 lbg	8 lbg	145.345	8 lbg	682.845	8 lbg	191.987	8 lbg	200.000	8 lbg	450.000	40 lbg	1.670.177	Bidang TPHBUN	
					2. Luas area AUTP di Kota Pariaman	1.000 Ha	1.000 Ha		1.000 Ha		1.000 Ha		1.000 Ha		1.000 Ha		5.000 ha			
					3. Jumlah lembaga petani yang ikut pelatihan (UP3HP, P3A, LKMA dll)	10 Klp	10 Klp		10 Klp		10 Klp		10 Klp		10 Klp		50 klp			
					4. Terlaksananya pendampingan, monitoring dan evaluasi PUAP	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
					5. Terlaksananya PEDANA dan Penas	1 keg	1 keg		1 keg		2 org		2 org		1 keg		3 keg			
					6. Jumlah PMT yang diberikan honor	2 orang	2 orang		2 orang		2 org		2 org		2 org		10 org			
					7. Jumlah lembaga penyuluhan dan Petani yang dinilai	8 lembaga	8 lembaga		8 lembaga		8 lembaga		8 lembaga		8 lembaga		8 lembaga			
		2. Produksi Hasil Perikanan	X.	Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	316 ton	318 ton	1.372.796	320 ton	2.273.000	323 ton	2.988.000	325 ton	2.677.999	328 ton	3.508.000	328 ton	12.819.795	Bidang Kelautan Perikanan	
				1. Pengembangan bibit ikan unggul	1. Jumlah benih unggul ikan gurami yang tersedia	75 ribu brnih	100.000	41.853	200.000		100.000		150.000		200.000	750 ribu benih	691.853	Bidang Kelautan Perikanan		
					2. Jumlah ketersediaan benih unggul pada pokdakan			100.000 benih	60.000 benih		75.000 benih		100.000 benih							
				2. Kesehatan Ikan Dan Lingkungan	1. Waktu pelaksanaan monitoring dan penyuluhan kesehatan ikan yang dilaksanakan	12 bln	12 bln	16.845	12 bln	100.000	12 bln	60.000	12 bln	60.000	12 bln	80.000	60 bln	316.845	Bidang Kelautan Perikanan	
					2. Jumlah kelompok peningkatan keamanan pangan dan budidaya ramah lingkungan berkelanjutan serta mampu memperbaiki kualitas lingkungan perairan	Belum ada	2 klp									2 klp				
					4. Lama Beroperasinya Posikandu	12 bln			12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		48 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)				
				3. Penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	1. Jumlah sertifikat Pokdakan dan UPR yang dikeluarkan 2. jumlah peserta sosialisasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) 3. Jumlah peserta sosialisasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	15 sertifikat tidak ada tidak ada	17 sertifikat 55.690 15 sertifikat 30 orang 5 sertifikat 75.000 5 sertifikat 75.000 5 sertifikat 75.000 5 sertifikat 75.000									47 Sertifikat 30 orang 20 orang	355.690	Bidang Kelautan Perikanan		
				5. Budidaya Ikan Keramba	1. Jumlah unit pengembangan budidaya ikan sistem karamba	10 unit	10 unit 176.460			10 unit 200.000	10 unit 200.000	10 unit 200.000	10 unit 200.000	40 unit 776.460		Bidang Kelautan Perikanan				
				6. Pendampingan Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri)	1. Jumlah kegiatan peningkatan produksi pakan mandiri 2. Terlaksananya pemberian bantuan perbaikan mesin pakan 3. Terlaksananya uji labor pakan ikan	Belum ada Belum ada Belum ada	1 keg 89.961 4 klp 1 kali	75.000			2 klp 75.000	2 klp 75.000	1 keg 314.961 8 klp 1 Kli		Bidang Kelautan Perikanan					
				7. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI serta percontohan Budidaya Air Tawar (DAK)	1. Jumlah paket percontohan Nila di kolam 2. Jumlah paket percontohan budidaya gurami 3. Jumlah paket budidaya lele di kolam 4. Jumlah paket budidaya ikan nila dengan padi (minapadi)	Belum ada Belum ada Sudah tidak ada 1 paket	6 paket 873.000 5 paket 5 paket 5 paket 2 paket	6 paket 873.000 5 paket 5 paket 5 paket 2 paket	6 paket 873.000 5 paket 5 paket 2 paket	6 paket 4.365.000 5 paket 5 paket 2 paket		Bidang Kelautan Perikanan								
				8. Bantuan Calon Induk Ikan Unggul	1. Jumlah calon induk ikan unggul bagi pembudidaya ikan	Belum ada	300 Kg 42.468		300 Kg 60.000	300 Kg 60.000	300 Kg 60.000	300 Kg 60.000	1200 kg 222.468		Bidang Kelautan Perikanan					
				9. Tabungan Gurami di Kolam Pekarangan (TAGURI)	1. Jumlah unit budidaya ikan gurami di kolam pekarangan 2. Jumlah paket bantuan (Kolam, Bibit dan Pakan)	Belum ada Tidak ada	10 unit 76.520 20 paket	200.000	25 unit 250.000			25 unit 260.000	60 unit 786.520 20 paket		Bidang Kelautan Perikanan					
				10. Budidaya lele bioflock	1. Jumlah paket bantuan bibit lele dengan sistem bioflock	Belum ada			10 paket 175.000	10 paket 175.000	10 paket 175.000	30 paket 525.000		Bidang Kelautan Perikanan						
				11. Mina Padi	1. Luas area mina padi pemberian bantuan bibit ikan dan pakan awal	1 ha		1 Ha 150.000	1 Ha 150.000			1 Ha 160.000	3 Ha 460.000		Bidang Kelautan Perikanan					
				12. Peningkatan Sapras Perikanan Budidaya	1. Jumlah paket sapra pendukung	Tidak ada			20 paket 200.000	20 paket 200.000	20 paket 210.000	60 paket 610.000		Bidang Kelautan Perikanan						
				13. Pendederan Gurami Skala Rumah Tangga	1. Jumlah paket ketersediaan benih ikan gurami	Tidak ada			10 paket 80.000		10 paket 85.000	20 paket 165.000		Bidang Kelautan Perikanan						
				14. Pengembangan Pakan Alami	1. Jumlah paket pakan alami yang dikembangkan	Masih skala kecil			1 paket 75.000	2 paket 150.000	2 paket 200.000	5 paket 425.000		Bidang Kelautan Perikanan						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (000)			
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)					
				15 Asuransi Pembudidaya Ikan (KUSUKA)	1 Jumlah peserta penerima asuransi	Belum ada					20 orang	150.000	25 orang	299.999	30 orang	250.000	75 orang	699.999	Bidang Kelautan Perikanan		
				16 Temu Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	1 Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	Belum ada					2 kali	100.000	2 kali	120.000	2 kali	150.000	6 kali	370.000	Bidang Kelautan Perikanan		
				14. Peningkatan SDM pembudidaya dan pembenihan ikan	1. Jumlah peserta workshoop pembudidaya dan pembenihan ikan	Masih sedikit			40 orang	50.000	50 orang	40.000	50 orang	40.000	50 orang	45.000	190 orang	175.000	Dinas Pert, Pangan dan Perikanan		
				15. Mina Ponik/Aquaponik/	1. Jumlah paket rumah tangga penerima	Belum ada			8 paket	200.000	8 paket	200.000	8 paket	200.000	8 paket	210.000	32 paket	810.000	Bidang Kelautan Perikanan		
				16 Pengembangan budidaya laut	1 Jumlah kelompok yang dibentuk 2 Jumlah lokasi aquarium yang dibuat 3 Jumlah paket Budidaya Rumput Laut yang dilaksanakan 4 Jumlah paket Budidaya udang vaname yang dilaksanakan 5 Jumlah paket Budidaya Tiram Mutiara yang dilaksanakan	Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada			1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi	350.000 175.000 480.000 150.000 200.000	1 klp 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi	200.000 200.000 480.000 200.000 200.000	1 klp 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi	200.000 220.000 500.000 450.000 500.000	2 klp 4 lokasi 5 paket 4 paket 4 paket	750.000		Bidang Kelautan Perikanan			
			XI.	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	<b>Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap</b>	6011 ton	6.270 ton	2.468.271	6.295 ton	1.473.052	6.315 ton	745.000	6.335 ton	1.050.000	6.400 ton	1.070.000	6.400 ton	6.806.323	Bidang Kelautan Perikanan	
				1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	1. Jumlah kelompok asuransi nelayan mandiri yang didampingi 2. Jumlah kelompok nelayan yang dilakukan penilaian 3. Jumlah peserta sosialisasi undang-undang penangkapan ikan 4. Jumlah unit sarana dan prasarana penangkapan ikan 5. Jumlah paket sarana dan prasarana penangkapan ikan 6. Jumlah kelompok yang dibina	15 kel 53 kel 53 kel Belum memadai Belum memadai 53 klp	53 kel 53 kel 34 unit 1 paket 53 klp	951.773 150.000	15 kel 150.000	15 kel 150.000	15 kel 150.000	15 kel 150.000	15 kel 150.000	15 kel 150.000	15 kel 150.000	53 kel 53 kel 34 unit 1 paket 265 klp	1.551.773		Bidang Kelautan Perikanan		
				2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1. Jumlah paket sarana perikanan tangkap yang diadakan 2. Jumlah perahu long tail 3. Jumlah mesin long tail	Belum memadai 143 unit 143 unit	7 paket 143 unit 143 unit	385.232 20 unit	600.000 20 unit 21 unit	600.000 600.000 250.000	20 unit 20 unit 21 unit	600.000 600.000 250.000	20 unit 20 unit 21 unit	600.000 600.000 250.000	20 unit 20 unit 21 unit	60 unit 60 unit 63 unit	985.232 1.800.000 750.000		Bidang Kelautan Perikanan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)			
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)					
					4. Jumlah alat tangkap gill net 5. Jumlah perahu payang	143 unit 9 unit				22 unit 23 unit	250.000 500.000	22 unit 23 unit	250.000 500.000	22 unit 23 unit	250.000 500.000	66 unit 69 unit	750.000 1.500.000	Bidang Kelautan Perikanan			
				3. Monitoring Sumberdaya Ikan	1. Waktu pelaksanaan monitoring sumberdaya ikan	12 bln	12 bln	73.570		12 bln	100.000	12 bln	100.000	12 bln	120.000	48 bln	393.570	Bidang Kelautan Perikanan			
				4. Penyediaan alat tangkap nelayan	1. Jumlah paket alat tangkap bagi nelayan kecil	Belum memadai	14 paket	920.210								14 paket	920.210	Bidang Kelautan Perikanan			
				5. Penguatan kelembagaan perikanan tangkap	1. Jumlah kelompok penguatan kelembagaan kelompok nelayan 2. Jumlah kelompok nelayan yang dilakukan pembinaan	53 klp 54 kel.			15 kel. 54 kel.	93.052	15 kel.	150.000	15 kel.	150.000	15 kel.	150.000	60 klp 54 kel.	920210	Bidang Kelautan Perikanan		
				6. Pelatihan penangkapan ikan bagi nelayan	1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Belum ada	-		20 org	200.000		20 org	200.000	20 org	200.000	60 org	600.000	Bidang Kelautan Perikanan			
				7. Restocking perairan umum	1. Jumlah dokumen kajian restocking perairan 2. Jumlah ikan yang direstoking	Belum ada 5.000 ekor	15.000 ekor	137.486	5.000 ekor	200.000	1 dok 30.000 ekor	1 dok 5.000 ekor	200.000	1 dok 5.000 ekor	200.000	3 dok 60.000 ekor	852.486	Bidang Kelautan Perikanan			
				8. Pembinaan Pokmaswas	1. Jumlah kelompok Pokmaswas yang dibina	18 klp			18 klp	130.000	18 klp	130.000	18 klp	150.000	18 klp	150.000		560.000	Dinas Pertanian, Pangan dan		
				9. Asuransi kecelakaan diri nelayan	1. Jumlah nelayan yang dapat asuransi				800 orang	100.000	50 orang	100.000	50 orang	100.000	50 orang	100.000	230 orang	400.000	Bidang Kelautan Perikanan		
			XII.	<b>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	<b>Meningkatkan minat masyarakat akan produk perikanan</b>	<b>Peningkatan Kesejahteraan Pemasar Produk Perikanan</b>	5%	5%	207.634	5%	925.000	5%	1.399.500	5%	947.000	5%	1.422.000	25%	4.901.134	Bidang Kelautan Perikanan	
				1. Peningkatan konsumsi ikan melalui program Gemar Ikan	1. Jumlah kegiatan lomba masak serba ikan tingkat kota dan provinsi yang diikuti	3 keg	3 keg	63.050		200.000	4 keg	200.000	4 keg	200.000	4 keg	200.000	15 keg	863.050	Bidang Kelautan Perikanan		
					2. Jumlah kegiatan lomba mewarnai dan lomba gemar ikan yang dilaksanakan	2 keg			2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		8 keg				
					3. Jumlah kegiatan lomba gemar ikan tk. Provinsi dan lomba inovasi masakan olahan ikan yang diikuti	2 keg			2 keg		2 keg		2 keg		2 keg		8 keg				
					4. Jumlah Festival makan ikan yang diikuti	Belum ada			1 keg	200.000	1 keg	210.000	1 keg	210.000	1 keg	220.000	4 keg				
				2. Pelatihan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu	1. Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan penerapan manajemen mutu hasil perikanan	40 org	40 org	19.952	50 org	75.000	20 org	85.000	20 org	85.000	20 org	85.000	120 org	349.952	Bidang Kelautan Perikanan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)			
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)					
				3. Pendampingan kegiatan Forikan	1. Jumlah pameran yang diikuti pada even-even pameran, pawai dan hari besar lainnya 2. Terlaksananya sosialisasi gemarikan 3. Terbentuknya forikan tk. Desa/kelurahan, dan pendampingan forikan tk Kecamatan	4 even	4 even 84.800	4 even 70.000	4 even 80.000	4 even 90.000	4 even 100.000	16 even 424.800			Bidang Kelautan Perikanan						
				4. Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Jumlah Poklahsar/UPI yang dibina	14 klp	14 klp 39.832	14 klp 200.000	14 klp 200.000	14 klp 200.000	14 klp 200.000	70 klp 839.832			Bidang Kelautan Perikanan						
				5. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran	1. Jumlah casebox yang diadakan 2. Jumlah case freezer yang diadakan 3. Jumlah Sarana Pengolah yang diadakan	belum ada belum ada belum ada	4 unit 8 unit unit	4 unit 8 unit unit	4 unit 8 unit unit	4 unit 8 unit unit	4 unit 8 unit unit	16 unit 32 unit unit	1.246.000		Bidang Kelautan Perikanan						
				6. Kontes Ikan Hias	1. Jumlah even kontes ikan hias	belum ada		1 even 200.000			1 even 200.000	2 even 400.000			Bidang Kelautan Perikanan						
				7. Peningkatan produksi ikan non konsumsi	1. Jumlah peserta pelatihan kekerangan 2. Jumlah peserta pelatihan aquscape	20 orang Belum ada	10 orang	20 orang 262.500	10 orang		20 orang 265.000	60 orang 777.500	30 orang		Bidang Kelautan Perikanan						
		3. Jumlah Populasi Ternak (Sapi)	XIII.	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	<b>Mencegah dan mengurangi penyakit ternak</b>	<b>Jumlah Populasi Ternak (sapi)</b>	2.323 ekor	2.358 ekor	124.134	2.393 ekor	328.363	2.429 ekor	340.785	2.466 ekor	353.828	2.503 ekor	367.523	2.503 ekor	1.514.633	Bidang Peternakan	
				1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	1. Jumlah pelaksanaan kontes kucing (HPR) 2. Jumlah hewan kurban yang diperiksa 3. Jumlah lokasi sosialisasi penyakit hewan menular 4. Jumlah lokasi pengawasan pemotongan hewan	Belum ada 100 ekr 10 spot 10 spot	1 kali 100 ekr 10 spot 10 spot	1 kali 100 ekr 10 spot 10 spot	1 kali 100 ekr 10 spot 10 spot	1 kali 100 ekr 10 spot 10 spot	1 kali 100 ekr 10 spot 10 spot	1 kali 100 ekr 10 spot 10 spot	5 kali 500 ekr 50 spot 50 spot	399.630		Bidang Peternakan					
				2. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	1. Jumlah hewan yang dimusnahkan terkena HPR 2. Jumlah hewan yang di sterilisasi HPR 3. Jumlah sosialisasi rabies	120 ekor 30ekr 10 seklh	120 ekor 30 ekor 10 seklh	120 ekor 67.212 150 ekr	120 ekor 67.212 150 ekr	120 ekor 70.573 160 ekr	120 ekor 74.101 165 ekr	120 ekor 77.806 175 ekor	333.900		Bidang Peternakan						
				3. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)	1. Jumlah sampel BPAH yang diperiksa	Belum ada	20 sampel	45.770	20 sampel	48.059	20 sampel	50.461	80 sampel	52.984	20 sampel	197.274		Bidang Peternakan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)				
				4. Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan ternak menjelang HBKN	1. Jumlah hewan yang diawasi dan diperiksa kesehatan menjelang Ramadhan, Idul Fitri dan idul adha	1000 ekor			1000 ekor	50.000	1000 ekor	52.500	1000 ekor	55.125	1000 ekor	57.881	4000 ekor	215.506	Bidang Peternakan	
				5. Sosialisasi penanggulangan penyakit rabies	1. Jumlah peserta yang disosialisasikan penyakit rabies dalam rangka kota pariaman bebas rabies 2020 2. Jumlah lokasi pemasangan display baliho	Belum ada 50 lokasi			500 orang 50 lokasi	65.455 50 lokasi	500 orang 50 lokasi	68.728 50 lokasi	500 orang 50 lokasi	72.164 50 lokasi	500 orang 50 lokasi	75.772 200 lokasi	2.000 orang 200 lokasi	282.119	Bidang Peternakan	
				6. Penguatan sistem informasi dan pelaporan kesehatan hewan	1. jumlah peserta pelatihan dan publisitas pelaporan kesehatan hewan	20 orang			20 orang	20.000	20 orang	21.000	20 orang	22.050	20 orang	23.153	80 orang	86.203	Bidang Peternakan	
		4. Jumlah Produksi (Daging Sapi)	XIV.	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>	<b>Jumlah Produksi Peternakan (daging sapi)</b>	651.464 ton	661.236 ton	228.261	671.154 ton	650.000	681.222 ton	679.250	691.440 ton	709.463	701.812 ton	740.686	701.812 ton	3.007.659	Bidang Peternakan	
				1. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	1. Jumlah itik yang didistribusikan pada 2. Jumlah peserta pelatihan beternak itik 3. Pembinaan peternak 4. Jumlah itik yang diberikan sebagai bantuan 5. Jumlah peserta sekolah lapang penerima bantuan	Belum ada Belum ada 48 bulan Belum ada Belum ada	1500 ekor 50 org	204.061	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	1500 ekor 50 orang	464.061	Bidang Peternakan	
				2. Pengembangan agribisnis peternakan	1. Jumlah kelompok peternak sapi yang di bina 2. Jumlah sapi yang ikut program AUTS 3. Jumlah peserta sekolah lapangan 4. Jumlah kelompok peserta pelatihan teknologi peternakan 5. Jumlah dokumen Data Statistik Peternakan 6. Jumlah kelompok penerima bantuan sapi dari provinsi dan pusat	15 kel 100 ekor Belum ada Belum ada 1 dok 17 klp	15 kel 100 ekor 20 org 20 klp 1 dok	24.200	250.000	16 kel 100 ekor 17 klp 20 klp 1 dok 17 klp	262.500	17 kel 100 ekor 17 klp 20 klp 1 dok 17 klp	275.625	18 kel 100 ekor 17 klp 20 klp 1 dok 17 klp	289.406	63 kel 500 ekor 51 klp 60 klp 3 dok 17 klp	1.101.731	Bidang Peternakan		
				3. Pengembangan hijauan makanan ternak	1. Jumlah peserta sekolah lapang 2. Jumlah area demplot HMT/HPT 3. Jumlah kelompok yang dibina penyedia HMT/HPT			30 org 2 Ha 1 thn	135.000	30 org 3 Ha 1 thn	141.750	30 org 3 Ha 1 thn	148.838	30 org 3 Ha 1 thn	156.279	120 org	581.867	Bidang Peternakan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal Renstra (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir periode Renstra (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)			
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)					
				4. Pendampingan UPSUS SIWAB	1. Pelaksanaan UPSUS SIWAB 2. Persentase peningkatan populasi sapi potong 3. Jumlah peserta pelatihan Medik dan Paramedik Veteriner			1 thn 0,3 % 4 org	200.000	1 thn 2 org	210.000	1 thn 2 org	220.000	1 thn 2 org	230.000	860.000	Bidang Peternakan				
			XV.	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b>	<b>Meningkatkan minat masyarakat akan produk</b>	<b>Peningkatan Kesejahteraan Peternak</b>	5%	5%	210.275	5%	1.335.000	5%	928.000	5%	1.125.000	5%	1.141.500	25%	4.739.775	Bidang Peternakan	
				1. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	1. Jumlah promosi yang dilakukan	6 event	7 event	110.175	7 event	250.000	35 event	1.110.175	Bidang Peternakan								
				2. Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan Produk Asal Hewan	1. Jumlah Sampel produk peternakan yang diperiksa 2. Terlaksananya sosialisasi produk asal hewan yang ASUH (aman sehat, Utuh dan halal)	1 kali 1 kali			150.000	1 kali 1 kali	157.500	1 kali 1 kali	150.000	1 kali 1 kali	157.500	3 kali 3 kali	615.000	Bidang Peternakan			
				3. Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan	1. Terbinanya usaha pengolahan hasil produksi peternakan baik teknis maupun kemasan 2. Terlaksananya sosialisasi NKV (Nomor kontrol veteriner) bagi unit usaha 3. Terlaksananya studi banding kelompok usaha untuk NKV	12 bln 1 kali belum ada		12 bln 1 kali 1 kali	80.000	12 bln 1 kali 1 kali	84.000	12 bln 1 kali 1 kali	80.000	12 bln 1 kali 1 kali	84.000	48 bln 4 kali 4 kali	328.000	Bidang Peternakan			
				4. Operasional Rumah Potong Hewan (RPH)	1. Terlaksananya pengawasan pemotongan di RPH 2. Jumlah tenaga pemotongan hewan sesuai syariah 3. Paket prasarana dan sarana RPH (rehabilitasi RPH)	12 bln 4 orang 1 paket		12 bln	500.000	12 bln 4 orang 1 paket	300.000	12 bln 4 orang 1 paket	500.000	12 bln 4 orang 1 paket	300.000	48 bln 12 orang 3 paket	1.600.000	Bidang Peternakan			
				5.	1. Tersedianya sarana dan prasarana IB 2. Terlaksananya Inseminasi buatan di kota pariaman 3. Terlaksananya pengawasan pemotongan betina produktif 4. Persentase Peningkatan populasi ternak	12 bln 4 kec 4 kec 5 %	12 bln 4 kec 4 kec 5 %	100.100	12 bln 4 kec 4 kec 2 %	130.000	12 bln 4 kec 4 kec 2 %	136.500	12 bln 4 kec 4 kec 2 %	145.000	12 bln 4 kec 4 kec 2 %	150.000	60 bln 20 kec 20 kec 13 %	661.600	Bidang Peternakan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)										
					5. Jumlah pendamping UPSUS SIWAB 6. Jumlah pengadaan strowl 7. Jumlah plastik sheet 8. Jumlah plastik glove 9. Jumlah N2 cair	2 org Belum ada Belum ada Belum ada Belum ada	2 org 1500 strowl 50 pak 30 pak 700 liter		2 org		2 org		2 org		2 org		10 org 1500 strowl 50 pak 30 pak 700 liter			
				6. Rehab Sedang Gedung RPH	1. Jumlah unit rehab gedung RPH	Perlu rehab untuk operasional	1 unit	225.000						1 unit	200.000	2 paket	425.000	Bidang Peternakan		
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan	5. Persentase Tingkat Komsumsi Pangan (Skor PPH)	XVI.	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)</b>	<b>Terciptanya kondisi ketersediaan pangan yang cukup untuk Kota Pariaman</b>	KetahananPangan : - PPH % Tk.Konsumsi Pangan (Skor PPH)	86%	86,5%	1.511.126	87%	3.157.386	86%	3.274.263	88%	3.465.651	89%	3.722.389	89%	15.130.815	Bidang TP HBUN dan Pangan	
			1. Penanganan daerah rawan pangan		1. Jumlah KK penanganan daerah rawan pangan 2. Jumlah lembaga yang dibantu pada daerah rawan pangan 3. Jumlah peserta sosialisasi penanganan daerah rawan pangan 4. Jumlah peserta Pelatihan Pengolahan Pangan	Rawan Pangan Belum ada Belum ada Belum ada	60 KK 8 lembaga 200 orang 60 orang	35.000	165.000	190 KK	173.250	180 KK	182.500	170 KK	190.750	600 KK 16 lembaga 200 orang 60 orang	746.500	Bidang Pangan		
			2. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan		1. Jumlah kelompok/desa yang dibina 2. Jumlah pesrta sekolah lapangan pemanfaatan pekarangan 3. Jumlah kelompok pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	10 kel belum ada	10 kel 40 org	116.050	148.050	10 kel.	162.855	10 kel.	179.141	10 kel.	197.055	40 kel 40 org 10 /klp/desa	803.150	Bidang Pangan		
			3. Pemantauan dan analisis harga dan Distribusi Pangan		1. Jenis komoditi yang menjadi objek pemantauan harga 2. Terlaksananya pemantauan HBKN 3. Jumlah pengadaan cadangan pangan daerah 4. Subsidi harga untuk KK Miskin	13 Jenis 2 kali 1.800 kg 200 KK	13 Jenis 2 kali 1.800 kg 200 KK	74.499	150.000	13 Jenis	157.500	13 Jenis	165.375	13 Jenis	173.644	65 jenis 2 kali 1.800 kg 1 juta KK	721.018	Bidang Pangan		
			4. Pengembangan cadangan pangan daerah		1. Jumlah Lumbung/PUPM yang dibina 2. Jumlah peserta pelatihan administrasi lumbung pangan dan PUPM 3. Jumlah lumbung pangan dan PUPM/TTI yang dibina	11 lb/PUPM Belum ada 11 lumbung	11 lb/PUPM 50 org	16.250	450.000		330.000		352.000		378.125	11 lb/PUPM 50 org 50 lb	1.526.375	Bidang Pangan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)										
					4. Tersedianya cadangan pangan	Lumbung tdk terisi			200 ton		160 Ton		100 Ton		80 Ton		540 ton			
					5. Penumbuhkebangnan Lumbung Pangan Daerah	11 lumbung			1 Lumbung Pangan		15 lbg pangan									
				5. Pendampingan desa mandiri pangan dan Agrowisata	1. Jumlah desa yang dibina mandiri pangan & agrowisata ( tungkal Selatan, cubadak Air, (Pauh Kurai Taji, Punaqung Lading )	4 desa	4 desa	124.600	4 desa	550.000	4 desa	577.500	4 desa	606.375	4 desa	636.694	20 desa	2.495.169	Bidang Pangan	
					2. Jumlah desa agrowisata (Punggung Lading )	2 Desa	2 Desa		2 Desa		2 Desa		2 Desa		2 Desa		10 desa			
					3. Jumlah peserta peningkatan kapasitas SDM desa mandiri pangan dan desa agrowisata	40 Orang	40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		160 orang			
				6. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	1. Jumlah posko pengendalian OPT	4 posko	4 posko	132.500	4 posko	160.000	4 posko	168.000	4 posko	175.000	4 posko	185.000	20 posko	820.500	Bidang TPHBUN	
					2. Jumlah tupai yang diburu dim rangka pengendalian OPT	7.500 ekor			7.500 ekor								7.500 ekor			
					3. Jumlah peserta pelatihan budidaya tanaman padi gogo	0	132 org										132 org			
					4. Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian OPT padi	4 kali	4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		20 kali			
					5. Jumlah peserta pelatihan SL PHT	100 org	132 org		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		732 orang			
					6. Jumlah peserta pelatihan budidaya jagung	belum ada	132 org										132 org			
					7. Jumlah peserta pelatihan pemangkas kakao	belum ada			100 orang								100 orang			
					8. Jumlah kelompok yang dilengkapi sarana produksi	10 kelompok			10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		40 kelompok			
					9. Jumlah kelompok tani kakao yang dibina	4 klempok			4 klempok								4 klempok			
				7. Pengembangan diversifikasi tanaman	1. Luas area tambahan tanaman jagung	10 Ha	10 Ha	117.000	10 Ha	150.000		157.500		165.000		172.500	20 H	762.000	Bidang TPHBUN	
					2. Luas area penambahan luas tanaman pangan	10 Ha					15 Ha		15 Ha		15 Ha		55 Ha			
				8. Pengembangan perbenihan/perbibitan	1. Jenis bibit buah-buahan yang diadakan	12 Jenis	12 Jenis	173.200		200.000	6 jenis	250.000	6 jenis	250.000	6 jenis	300.000	30 Jenis	1.173.200	Bidang TPHBUN	
					2. Jumlah penangkar benih tanaman pangan, palawija dan hortikultura yang dibina	8 penangkar	8 penangkar		8 penangkar								8 penangkar			
					3. Jumlah kelompok yang dibina untuk desa mandiri benih (DMB)	5 kelompok			5 kelompok		5 kelompok		8 kelompok		8 kelompok		26 kelompok			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)	Tar get	Rp (000)				
				9. Peningkatan mutu dan keamanan pangan	1. Jumlah sampel pangan yang diuji pada laboratorium 2. Jumlah peserta sosialisasi mutu dan keamanan pangan	15 sampel 50 org	15 sampel 50 org	31.280	16 sampel 200 orang	85.000	20 sampel 240 orang	93.500	24 Sampel 280 orang	102.850	28 sampel 320 orang	113.135	103 sampel 1090 org	425.765	Bidang Pangan	
				10 Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia	1. Jumlah Gapoktan pelaksana kegiatan usaha masyarakat (TTI) yang dibina	Belum ada			1 gapoktan	50.000	1 gapoktan	50.000	1 gapoktan	50.000	1 gapoktan	50.000	4 gapoktan	200.000	Bidang Pangan	
				11. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan	1. Jumlah kelompok tani kakao yang dibina 2. Jumlah tupai yang diburu pada OPT tupai 3. Jumlah peserta pelatihan perteksi tanaman kakao	4 keltan 7.500 ekor -	4 keltan 7.500 ekor 100 org	122.890	4 keltan 7.500 ekor 100 org	150.000	4 keltan 7.500 ekor 100 org	157.500	4 keltan 7.500 ekor 100 org	165.375	4 keltan 7.500 ekor 100 org	173.644	20 keltan 37.500 ekor 500 orang	769.409	Bitang TPHBUN	
				12. Penyuluhan sumber pangan alternatif	1. Jumlah kelompok peserta lomba B2SA 2. Jumlah peserta pelatihan pangan lokal dan sosialisasi B2SA 3. Jumlah peserta penyuluhan B2SA	20 klp 60 orang 60 orang	20 klp 60 orang 60 orang	98.282	20 klp 200 Orang	180.000	20 klp 250 Orang	198.000	20 klp 300 Org	217.800	20 klp 350 Orang	239.580	100 klp 60 orang 1160 Orang	933.662	Bidang Pangan	
				13. Operasional Penunjang Dewan Keta hanan Pangan	1. Jumlah peserta rakor dewan ketahanan pangan daerah 2. Terlaksananya rakor Tk. Kecamatan dewan ketahanan pangan	90 orang Belum ada	90 orang Belum ada	16.400	100 orang 4 kec/100 orang	46.000	100 orang -	50.600	100 orang -	55.200	100 orang -	59.800	490 orang 4 kec/100 orang	228.000	Bidang Pangan	
				14. Sistem Pelapor an Katahanan Pangan	1. Jumlah dokumen laporan PPH 2. Jumlah KK yang didata sebagai Pola Pangan Harapan (PPH)	1 Dok 900 KK	1 Dok 900 KK	33.210	900 KK	70.000	1 Dok 900 KK	77.000	1 Dok 900 KK	84.700	1 Dok 900 KK	93.170	4 dok 3600 KK	358.080	Bidang Pangan	
				15. Pendampingan Upsus Peningkatan Produksi Padi Menuju Swasembada	1. Jumlah kelompok pendampingan UPSUS 2. Terlaksananya Fild Day Tanam/Panen	40 kel 2 kali	40 kel 2 kali	103.250	40 kel 2 kali	140.000	157 klp 2 kali	147.000	157 klp 2 kali	158.000	157 klp 2 kali	170.500	551 klp 10 kali	718.750	Bidang TPHBUN	
				16. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Tanaman Hortikultura	1. Jumlah peserta sosialisasi pengembangan tanaman hortikultura 2. Tersedianya bibit tanaman buah-buahan 3. Tersedianya bibit tanaman hias 4. Jumlah kelompok yang diberi bantuan pohon induk tanaman perkarangan	Belum ada Belum ada	160 org 6 jns 6 jns	246.541	5 kelompok	304.341	100 org 6 jenis 12 jenis 16 penangkar	319.558	100 org 6 jenis 12 jenis 16 penangka r	335.536	100 org 6 jenis 12 jenis 16 penangka r	352.313	460 org 24 jenis 42 jenis 53 penangkar	1.558.289	Bidang TPHBUN	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja diawal RPJMD (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja diakhir RPJMD (2023)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019		2020		2021		2022		2023		Tar get	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Tar get	Rp (000)										
					5. Jumlah polibag bibit cabe untuk tanaman perkarangan	Belum ada			50.000 polibag		50.000 polibag		70.000 polibag		70.000 polibag		240.000 polibag			
					6. Jumlah bibit tanaman buah perkarangan	belum ada			1.000 btg											
					7. Jumlah paket sarana prasarana hidroponik	Belum ada			10 paket		15 paket		15 paket		15 paket		55 paket			
				17. Penyusunan dan Analisa Ketersediaan Pangan (SKPG, FSVA, NBM)	1. Jumlah dokumen SKPG, FSVA dan NBM yang disusun	3 dok	3 dok	22.350	3 dok	50.000	3 dok	55.000	3 dok	60.000	3 dok	65.000	15 dok	252.350	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Kota Pariaman
					2. Jumlah peserta pelatihan penyusunan data ketersediaan pangan	2 orang	2 orang				2 orang		2 orang		2 orang		8 orang			
					3. Jumlah dokumen laporan bulanan dan tahunan SKPG, FSVA dan NBM	3 dokumen			3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		12 dokumen			
					4. Jumlah peserta sosialisasi ketersediaan pangan	50 orang			50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		200 orang			
				18. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/ perkebunan yang dipasarkan	1. Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan dan wawasan kelompok pengolah pangan secara SNI	40 orang	40 orang	18.750	40 orang	80.000	40 orang	88.000	40 orang	96.800	40 orang	106.480	200 orang	390.030	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Kota Pariaman
				19. Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Pangan	1. Jumlah dokumen data dan informasi sebagai bahan acuan dalam penyusunan program dan kebijakan ketersediaan pangan di Kota Pariaman	Belum ada					1 dok	31.500	1 dok	34.000	1 dok	35.000	3 dok	100.500	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Kota Pariaman
				20. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik (Musrenbangtan)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pertanian	1 dok	1 dok	29.074	1 dok	28.995	1 dok	30.000	1 dok	30.000	1 dok	30.000	5 dok	148.069	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Kota Pariaman

Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman  
  
**DASRIL, S.Sos.**  
 NIP. 191219 199303 1 002

Tujuan	Sasaran	Kode					Nomenklatur Urusan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Sub Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja di Awal Renstra (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2021		2022		2023				Kondisi Kinerja di Akhir Renstra (2023)	
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target	Rp (000)
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian								18.37%	18.47%		18.57%		18.67%						
Meningkatnya Ketahanan Pangan	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		72.87%	73.37%	1,297,259.9	74.07%	2,443,821.6	74.97%	2,638,565.3	74.97%	6,379,646.8			
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Indek Ketahanan Pangan	64,77%	73,78%	1,297,259.9	78%	2,443,821.6	81%	2,638,565.3	90%	6,379,646.8			
	2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Stok Pangan yang tersedia	75%	76%	99,991	77%	109,990	78%	120,989	78%	330,970.2			
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan Daerah Kab/Kota				99,991		109,990		120,989		330,970.2			
	2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1. Jumlah lantai jemur yang tersedia	3 lpm	3 lpm	99,991	3 lpm	109,990	3 lpm	120,989	9 lpm	330,970.2	DPPP	Pariaman	
	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	% AKE (Angka Kecukupan Energi)	97%	100%	1,058,962.2	100%	1,836,481.5	100%	1,982,411.2	100%	4,877,854.9			
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				730,495		760,159		828,775		2,319,428.9			
	2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1. Jumlah dokumen yang di susun 2. Pemantuan harga pasar 3. Pemantauan harga pasar	1 dokumen 365 hari 12 jenis	1 dokumen 365 hari 12 jenis	14,995	1 dokumen 365 hari 12 jenis	34,000	1 dokumen 365 hari 12 jenis	35,000	3 dokumen 365 hari 12 jenis	83,995.0	DPPP	Pariaman	

2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya lokal	1. Jumlah kelompok/desa yang dibina	10 kelompok	10 kelompok	614,690	10 kelompok	676,159	10 kelompok	743,775	30 klp	2,034,623.9	DPPP	Pariaman
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	1. Jumlah Gapoktan pelaksana kegiatan usaha masyarakat (TTI) yang dibina	1 Gapoktan	1 Gapoktan	100,810	1 Gapoktan	50,000	1 Gapoktan	50,000	3 gapoktan	200,810.0		Pariaman
2	09	03	2.02		<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>			152,225		167,448		184,192		503,864.8			
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Pengadaan cadangan pangan Pemerintah	20 ton	20 ton	152,225	20 ton	167,448	20 ton	184,192	60 ton	503,864.8		Pariaman
2	09	03	2.04		<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>			176,242		908,875		969,444		2,054,561.2			
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	1. Jumlah dokumen laporan PPH 2. Jumlah KK yang di data sebagai pola pangan harapan (PPH)	1 Dokumen 900 KK	1 Dokumen 900 KK	33,622.2	1 Dokumen 900 KK	84,700	1 Dokumen 900 KK	93,170	3 dokumen	211,492.2		Pariaman
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1. Jumlah kelompok peserta lomba dan sosialisai B2SA	20 kelompok	20 kelompok	142,620	20 kelompok	824,175	20 kelompok	876,274	60 kelompok	1,843,069.0		Pariaman
2	09	04			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>% peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>111,955</b>	<b>80%</b>	<b>297,700</b>	<b>80%</b>	<b>315,550</b>	<b>80%</b>	<b>725,205.0</b>		
2	09	04	2.01		<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>			21,500		60,000		65,000		146,500.0			
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1. Jumlah Dokumen SKPG, FSVA yang di susun 2. Jumlah peserta pelatihan penyusunan data ketersediaan pangan 3. Jumlah dokumen laporan bulan dan tahunan SKPG, FSVA 4. Jumlah peserta sosialisasi ketersediaan pangan	2 Dokumen 2 orang 2 dokumen 50 Orang	2 Dokumen 2 orang 2 dokumen 50 Orang	21,500	3 Dokumen 2 orang 3 Dokumen 50 Orang	60,000	3 Dokumen 2 orang 3 Dokumen 50 Orang	65,000	8 dokumen 6 orang 6 dokumen 150 orang	146,500.0		Pariaman

	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				90,455		237,700		250,550		578,705.0		
	2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta rakor Dewan Ketahanan pangan daerah		100 Orang	15,855	100 Orang	55,200	100 Orang	59,800	300 orang	130,855.0		Pariaman
	2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah KK penanganan daerah rawan pangan 2. Jumlah peserta sosialisasi penanganan daerah rawan pangan		190 KK 40 orang	74,600	180 KK	182,500	170 KK	190,750	540 KK 40 orang	447,850.0		Pariaman
	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	% keamanan pangan	90	91	26,351.7	92	199,650.0	93	219,615.0	93	445,616.7		
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				26,351.7		199,650.0		219,615.0		445,616.7		
	2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah sampel pangan yang diuji pada laboratorium 2. Jumlah peserta sosialisasi mutu dan keamanan		20 Sampel 240 Orang	26,351.7	24 Sampel 280 Orang	199,650	28 Sampel 320 Orang	219,615	72 sampel 840 orang	445,616.7		Pariaman
Peningkatnya Produksi Sektor Pertanian	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				18,251,968.4		21,593,543.0		22,813,207.0		62,658,718.4		
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Hasil Perikanan	6.526,42 Ton	6.638 Ton	4,310,650.7	6.660 Ton	5,990,000.0	6.728 Ton	6,612,000.0	6.728 ton	16,912,650.7		
	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan		6.315 Ton	2,597,191.5	6.335 ton	3,280,000.0	6.400 ton	3,305,000.0	6.400 ton	9,182,191.5		
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				2,370,212		2,600,000		2,620,000		7,590,212		
	3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1. Tersedianya data sumberdaya ikan		1 dok	83,119	12 bulan	100,000	12 bulan	120,000	1 dokumen 24 bulan	303,119.0		Pariaman
	3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1. Jumlah pengadaan mesin tempel, perahu dan alat tangkap		24 unit	2,201,572.5	8 unit	2,300,000.0	8 unit	2,300,000.0	40 unit	6,801,572.5		Pariaman
	3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan	1. Jumlah bibit restocking		40.000 ekor	85,520	5000 ekor	200,000	5000 ekor	200,000		485,520.0		Pariaman
	3	25	03	2.01	4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Pelayanan dan Penyelenggaraan TPI	1. Jumlah TPI					1 unit	300,000	1 unit	300,000	2 unit	500,000.0	

3	25	03	2.02		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>226,980</b>		<b>680,000</b>		<b>685,000</b>		<b>1,591,980.0</b>		
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Pembuatan/perbaikan perahu fiber				87,095		500,000		500,000		<b>1,087,095.0</b>		Pariaman
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	1. Jumlah kelompok yang dibadan hukumkan		2 klp		77,915		80,000	2 klp	85,000		<b>242,915.0</b>		Pariaman
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1. Jumlah nelayan yang diasuransikan		50 orang		61,970		100,000	50 orang	100,000		<b>261,970.0</b>		Pariaman
3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah produksi perikanan budidaya</b>			<b>323 ton</b>	<b>1,514,594.2</b>	<b>325 ton</b>	<b>1,963,000.0</b>	<b>328 ton</b>	<b>2,550,000.0</b>	<b>328 ton</b>	<b>6,027,594.2</b>		
3	25	04	2.02		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>					<b>1,013,673</b>		<b>1,453,000</b>		<b>2,010,000</b>		<b>4,476,673.0</b>		
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1. Jumlah paket budidaya ikan gurami dlm kolam nekarangan 2. Jumlah Paket ikan lele dengan sistem damber yg diadakan 3. Jumlah budidaya ikan nila dengan padi yg dilakukan 4. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 5. Jumlah benih ikan yang diadakan 6. jumlah pakan ikan yang diadakan	30 unit  10 paket  25 orang 35.000 ekor 5600 kg	25 unit 5 paket 1 ha 25 orang 35.000 ekor 5600 kg		951,480		1,158,000	25 unit 5 paket 1 ha 25 orang 35.000 ekor 5600 kg	1,713,000		<b>3,822,480.0</b>		Pariaman
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	1. Jumlah kelompok Budidaya ikan yang dibadan hukumkan	1 kelompok	2 klp		44,620		45,000	2 klp	47,000		<b>136,620.0</b>		Pariaman
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi CPIB dan CBIB	25 orang	30 orang		17,573		250,000	30 orang	250,000		<b>517,573.0</b>		Pariaman
3	25	04	2.04		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>					<b>500,921.2</b>		<b>510,000.0</b>		<b>540,000.0</b>		<b>1,550,921.2</b>		
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	1. Tersedianya Data dan informasi SDI	1 tahun	1 tahun		43,015		50,000	1 tahun	60,000		<b>153,015.0</b>		Pariaman

	3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	1. Jumlah benih ikan lele yang diadakan 2. Jumlah benih ikan nila yang diadakan 3. Jumlah benih ikan gurami yang diadakan 4. Jumlah calon induk lele yang diadakan	60000 ekor 45000 ekor 60000 ekor 400 kg	371,107	60000 ekor 45000 ekor 60000 ekor	400,000	60000 ekor 45000 ekor 60000 ekor 300 kg	400,000	1,171,107.0		Pariaman	
	3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	1. Beroperasinya Posikandu 2. Honorarium PTT (Tenaga Kontrak SLTA ke Bawah) 3. Uji Labor penyakit Ikan 4. Uji Labor Sampel Air Kolam Perikanan 5. Jumlah monitoring dan penyuluhan kesehatan ikan yang dilaksanakan 6. Jumlah uji labor pakan ikan	12 bulan 1 orang  25 pokdakan 18 UPR 5 sampel	86,799.2	12 bulan 1 orang 40 sampel 40 sampel 25 pokdakan 18 UPR 5 sampel	60,000	12 bulan 1 orang 40 sampel 40 sampel 25 pokdakan 18 UPR 5 sampel	80,000	226,799.2		Pariaman	
	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah jenis olahan ikan	7 jenis	7 jenis	198,865	7 jenis	747,000	7 jenis	757,000	7 jenis	1,702,865.0	
							Jumlah Pengolah ikan yang dibina	30 upi	30 upi		31 upi		31 upi		31 upi		
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			198,865		747,000		757,000		1,702,865.0		
	3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1. Jumlah Lomba yang diadakan	4 lomba	198,865	1 even	747,000	1 even	757,000		1,702,865.0		Pariaman
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			13,941,317.71		15,603,543.00		16,201,207.00		45,746,067.7		
	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85%	12,953,271.59	86%	13,650,000.00	86%	14,107,000.00	86%	40,710,271.6		
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai LAKIP SKPD		44,999.0		50,000.0		50,000.0		144,999.0		



						4. Jumlah kursi eselon IV 5. Meja receptionos 6. Filing cabinet	21 Unit  1 Unit										
3	27	01	2.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		253,785		293,000		402,000		948,785.0			
3	27	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Materai 10000	350 surat	3,500	2000 surat	2,500	2000 surat	3,000	9,000.0			Dinas
3	27	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jasa Telepon Jasa Air Jasa Listrik	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	84,000	12 bulan	117,000	12 bulan	120,000	321,000.0			
3	27	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Alat dan Bahan Kebersihan 2. Honor Tenaga Kebersihan 3. Honor Penjaga Kantor 4. Honor Sopir 5. Pengadaan Pakaian Kerja	1 Tahun  7 Orang 1 Orang 1 Orang 11 Stel	166,285	12 bulan	173,500	12 bulan	279,000	618,785.0			Dinas
3	27	01	2.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		281,880		320,000		325,000		926,879.7			
3	27	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Kendaraan Roda 4 2. Kendaraan Roda 2 3. Cek Fisik Kendaraan	4 Unit 36 Unit 4 Kali	223,039.65	4 Unit 77 unit 1 tahun	245,000	4 Unit 77 unit 1 tahun	250,000	718,039.7			Dinas
3	27	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Gedung Kantor 2. Service AC 3. Service Komputer 4. Service Laptop 5. Service Printer	1 Unit 10 Unit 5 Unit 5 Unit 4 Unit	58,840	2 unit 15 unit	75,000	2 unit 15 unit	75,000	208,840.0			Dinas
3	27	02				<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi padi	26.799 Ton	21.205 ton	988,046.116	21.527 ton	1,953,543.000	21.957 ton	2,094,207.000		5,035,796.1	
							Jumlah produksi Perkebunan	2699 ton	2699 ton		2799 ton		2899 ton		2899 ton		
							Jumlah produksi Holtikultura	544 kwintal	544 kwintal		554 kwintal		564 kwintal		564 kwintal		
3	27	02	2.01			<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>			988,046.116		1,953,543.000		2,094,207.000		5,035,796.1		
3	27	02	2.01	01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1. Pengembangan dan SL bawang, cabe 2. Pengembangan kelapa genjah 3. Pengembangan tanaman buah 4. Pengembangan dan SL Tanaman padi dan jagung	4 Kec 4166 btg 1000 btg 4 Kec	744,296	7000 bibit	1,656,303	7000 bibit	1,782,105	4,182,704.1			Pariaman
3	27	02	2.01	02		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1. Jumlah pelaksanaan sosialisasi kartu tani 2. Jumlah pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi 3. Jumlah Penyusunan e-RDCK	4 Kec 4166 btg 4 Kec	243,750		297,240		312,102	853,092.0			Pariaman



						3. jumlah alat pengolahan pakan		2 paket									
						4. Jumlah ternak kambing yang didistribusikan		16 ekor									
						5. Jumlah ternak itik yang didistribusikan		1200 ekor	1500 ekor		1500 ekor						
						6. Jumlah ternak ayam buras yang didistribusikan		500 ekor									
						7. Jumlah ternak puyuh yang didistribusikan		2000 ekor									
						8. Jumlah peserta pelatihan itik		30 orang									
						9. Jumlah peserta pelatihan puyuh		30 orang									
						10. Jumlah peserta pelatihan kambing		30 orang									
						11. Jumlah alat pengolahan pakan		2 paket									
3	27	03			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Pesentase Parsarana Pertanian dalam kondisi baik</b>	<b>80%</b>	<b>85%</b>	<b>2,732,385</b>	<b>86%</b>	<b>2,700,200</b>	<b>87%</b>	<b>2,800,400</b>	<b>87%</b>	<b>8,232,985.0</b>		
3	27	03	2.01		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>				<b>116,385</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>116,385.0</b>		
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	1. Perda LP2B Kota Pariaman 2. Jumlah peserta Sosialisasi Perda LP2B Kota Pariaman		1 dokumen <b>120 org</b>	116,385		0		0				Pariaman
3	27	03	2.02		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>				<b>2,616,000</b>		<b>2,700,200</b>		<b>2,800,400</b>		<b>8,116,600.0</b>		
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1. Jumlah rehabilitasi JIUT		12 paket	2,416,000	5 paket	2,500,000	5 paket	2,600,000		<b>7,516,000.0</b>		Pariaman
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1. Jumlah rehabilitasi JUT		1 paket	200,000	1 paket	200,200	1 paket	200,400		<b>600,600.0</b>		Pariaman
3	27	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>% Penurunan Luasan Serangan Hama/penyakit</b>	<b>80%</b>	<b>85%</b>	<b>208,890</b>	<b>86%</b>	<b>165,375</b>	<b>86%</b>	<b>173,644</b>	<b>86%</b>	<b>547,909.0</b>		
3	27	05	2.01		<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>				<b>208,890</b>		<b>165,375</b>		<b>173,644</b>		<b>547,909.0</b>		
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Jumlah gerakan pengendalian OPT Tan. Pangan 2. Jumlah OPT Perkebunan (Tupai) yang dikendalikan 3. Jumlah pengadaan pestisida 4. Jumlah peserta Sekolah Lapang/Brigade Proteksi Hama dan Gerakan Pemangkasan Tanaman Kakan		5000 ekor   100 orang	208,890	7500 ekor   100 Orang	165,375	7500 ekor   100 Orang	173,644		<b>547,909.0</b>		Pariaman

							5. Jumlah Posko Pengendalian OPT yang dibina												
		3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	sumberdaya aparatur Penyuluh Pertanian yang berkualitas	80%	85%	340,085	86%	488,250	87%	860,000	87%	1,688,335.0		
								sumberdaya Petani yang berkualitas											
		3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				340,085		488,250		860,000		1,688,335.0		
		3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			1 kegiatan	145,000		152,250		160,000		457,250.0		4 Kecamatan
		3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah Gapoktan/LKM A yang didampingi dalam pengelolaan dana PIAP 2. Jumlah peserta Pelatihan P3A dan GP3A 3. Jumlah peserta Pelatihan Pengolahan Pupuk Organik 4. Jumlah kategori Penilaian PPL, Petani, PPS dan Kelembagaan 5. Jumlah kelembagaan Petani yang dibina 6. Koordinasi KTNA Kota Pariaman		65 klp 40 orang 40 orang 8 kartegori 8 lembaga 1 tahun	195,085		336.000 100 orang 100 orang 8 lembaga		700,000 100 orang 8 lembaga		1,231,085.0		Pariaman
		3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus zoonosis	25%	20%	1,187,210.11	20%	1,187,210.11	20%	1,187,210.11	25%	3,561,630.3		
		3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				140,208.46		298,702.00		309,641.00		748,551.5		
		3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1. Terlaksananya pengobatan ternak 2. Terlaksananya sosialisasi kesehatan hewan		200 ekor 100 Orang	70,208		130,387		132,910		333,505.5		4 Kecamatan
		3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya sosialisasi penanggulangan penyakit rabies 2. Terlaksananya rakor rabies tingkat kota Pariaman		500 orang 500 Orang	70,000	500 orang	168,315	500 orang	176,731		415,046.0		Pariaman

						3.	Terlaksananya penurunan populasi HPR	100 ekor		160 ekr		165 ekor						
3	27	04	2.02				<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>				112,588.35	120,000.00	150,000.00		382,588.4			
3	27	04	2.02	02			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1.	Terlaksananya pengawasan pemotongan ternak menjelang ramadhan, idul fitri dan idul adha	4 kec	112,588	4 kec	120,000	4 kec	150,000		382,588.4	4 Kecamatan

							2. Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pengawasan pemotongan hewan kurban	4 kec		4 kec		4 kec					
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan kesejahteraan peternak		141,746.715		832,931.165		644,431.165		1,619,109.0		
	3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1. Terlaksananya sosialisasi NKV 2. Terlaksananya sosialisasi pemotongan ternak yang asuh bagi pelaku pemotongan ternak	25 orang 20 orang	38,815.55	1 kali 1 kali	730,000	1 kali 1 kali	541,500		1,310,315.6		Pariaman
	3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	1. Terlaksananya pelatihan dan kelengkapan sarana dan prasarana pengolahan nakan	40 orang	63,740.67	40 orang	63,740.67	40 orang	63,740.67		191,222.0		Pariaman
	3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Jumlah sampel BPAH yang diperiksa	40 sampel	39,190.5	40 sampel	39,190.5	40 sampel	39,190.5		117,571.5		Pariaman

Komisaris Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman  
  
**DR. SRIL, S.Sos.**  
 NIP. 1219 199303 1 002